

ASAS-ASAS DAN SUSUNAN HUKUM-ADAT

(BEGINSELEN EN STELSEL VAN HET ADATRECHT)

OLEH :

MR B. TER HAAR BZN.

1960

Penerbit Negara : PRADNJA PARAMITA
d/h J. B. Wolters
D J A K A R T A

TERDJEMAHAN :

K. NG. SOEBAKTI POESPONOTO

Dosen U. I. I. Surakarta

SEPATAH KATA PENERDJEMAH.

Usaha terdjemahan ini timbul dari keinginan akan menjadikkan sebuah kitab jang lengkap kepada para peladjar pendahuluan hukum-adat dibawah asuhan penerdjemah, jang sebagian besar tidak atau kurang faham akan bahasa Belanda. Pada hal buah tangan Ter Haar ini betul sudah diterdjemahkan kepada bahasa Inggris, tapi kepada bahasa Indonesia sepanjang pengetahuan penerdjemah sampai sekarang belum ada salinannya.

Mula² terdjemahan ini terbit sefatsal demi sefatsal, jang lalu ditbitjarakan dan disana sini dibetulkan bersama², hal mana sangat dipermudah karena memang untuk penilikan sedemikian itu pemberian nomor halaman² terdjemahan sudah ditjotjokkan dengan penomoran halaman² dalam buku aslinja.

Mengapakah djustru buah tangan Ter Haar „beginselen en stelsel van het adatrecht" jang diterdjemahkan? Karena antara lain menurut pendapat sardjana² hukum-adat Prof. Soepomo dan Prof. Logemann „pandangan jang mahir daripada Ter Haar tentang asas² dan susunan hukum-adat sampai sekarang masih tetap menjadi ukuran".

Berhubung dengan mutu keilmuan daripada isi buku ini, ditambah pula karena sukarnya tjara penulis membahas soal² — jaitu antara lain dengan memakai rangkaian kalimat² jang pandjang, tapi padat dalam artinja — maka disini diusahakan suatu terdjemahan jang selurus mungkin, tidak ditambah atau dikurangi dengan djalan uraian, komentar atau lain²-nja dari fihak penjalin, itupun karena ia chawatir kalau² dengan tak disengadja nanti akan timbul makna jang lain dari pada mestinja.

Kata² asing jang belum lazim, setengah lazim atau sudah lazim dipakai dalam bahasa Indonesia ditulis disini dengan sengadja tidak menurut sesuatu sistim edjaan jang tertentu, itupun berhubungan dengan sampai sekarang belum adanya sistim itu, pula mengingat, sebagaimana termaklum, bahwa bahasa Indonesia sedang berada dalam fase pertumbuhan, misalnja : delikt, disertasi, exogaam, fungsi, genealogis, kritis, kongkrit, koöperasi, magis, materieel, objek, toch dan sebagainya.

Pula dimana dipandangnja perlu untuk penegasan, maka penerdjemah tidak segan² mentjantumkan diantara dua tanda kurung : kata², istilah, bahkan seluruh kalimat, kesemuannya dalam bentuk aslinja dibelakang terdjemahannya, misalnja : pokrol²-an (juristerij), paruh-hasil-tanam (deelbouw), tolong menolong antara satu sama lain dan bertimbal balik (onderling en wederkerig hulpbetoon) dan sebagainya.

Pokok maksud usaha ini ialah, sebagaimana diterangkan diatas tadi, sekedar untuk memenuhi kebutuhan jang perlu sekali, lagi mendesak; maka dari itu bilamana disana sini terdapat misalnja susunan kalimat jang djanggal atau kata² jang kurang lazimnja, diharap buat sebentar berpegangan pada peribahasa: „djanganlah membatja jang tersurat, tapi ambillah jang tersirat” hendaknja.

Achirnja, djuga karena penerdjemah bukannya seorang ahli dalam hal salin menjalin, maka setiap kritik jang bersifat membangun atas usahanja jang serba kurang ini akan diterimanja dengan segala suka hati.

Surakarta, Agustus 1953.

SOEBAKTI POESPONOTO.

Pada tanggal 19 April 1941 gugurlah Ter Haar ditempat pengasingan Djerman. Pekerdjaannja keilmuan terbungkelailah oleh karenanja. Pekerdjaan jang berguna akan orang banjak untuk keluhuran tata usaha pengadilan itu berada dalam angin-ribut suatu revolusi politik dan sosial.

Saja tak chawatir kalau² usaha²-nja itu akan lenjap. Kemurnianja, kadarnja jang kritis dan kesukaannja akan hakekat, kesemuanja itu adalah djaminan akan kebenaran pendapat saja itu. Baik pekerdjaannja, maupun manusia Ter Haar tidak akan dapat dihapuskan dari sedjarah peradaban Indonesia.

Penjelidikan dan pertumbuhan hukum-adat sesungguhnya tidak pernah berhenti sedjak tahun 1940. Tapi penglihatan Ter Haar jang mahir tentang asas² dan susunanja buat sementara tetap menjadi ukuran, sehingga pentjetakan ulangan dengan tiada perubahannja benar² dapat dipertanggung-djawabkan.

Mudah²-an penindjauan kembali atau penggantian pada saat jang lebih tepat untuk itu nanti akan terbimbing oleh tenaga jang berpengalaman, jang tjakap dan jang penuh rasa chidmat pula terhadap almarhum hendaknja.

LOGEMANN.

SEPATAH KATA PENGANTAR.

Pada perguruan-perguruan tinggi/fakultas-fakultas hukum ataupun perguruan-perguruan sesamanja, buku Prof. Mr B. Ter Haar Bzn. „Beginselen en Stelsel van het Adatrecht” dewasa ini masih merupakan literatur-wadhib untuk mata-peladjaran hukum adat.

Tetapi kenyataan menundjukkan, bahwa buku tersebut tidak lagi dapat dimengerti oleh sebagian besar para mahasiswa, karena mereka sudah tidak dapat memahami bahasa Belanda, sedangkan buku itu merupakan dasar bagi peladjaran hukum adat.

Dari fihak Universitas belumlah ada usaha untuk menterdjemahan buku tersebut. Maka dari itu terdjemahan Sdr. K. Ng. Soebakti Poesponoto ini wadhib kita sambut dengan gembira, karena terdjemahan ini akan besar sekali manfaatnja bagi para mahasiswa.

Dapat kami katakan disini, bahwa terdjemahan ini adalah sangat seritus, walaupun disana sini masih ada beberapa kekurangan. Kekurangan-kekurangan ini diakui oleh penterdjemahinja dan dengan sangat gembira beliau sedia menerima kritik-kritik jang menudju kesempurnaan terdjemahannja itu.

Sebagai asisten dari Prof. Mr M. M. Djojodigoeno jang diserahi tugas untuk mengudji para mahasiswa fakultas hukum & fakultas Sosial Politik Universitas Gadjah Mada dan fakultas Hukum Universitas Airlangga mengenai literatur, kami dapat mengandjurkan kepada para mahasiswa dan peminat-peminat hukum adat untuk menggunakan dan menilai terdjemahan ini.

Terdjemahan ini sangat memenuhi kebutuhan. Harapan kami mudah-mudahan — kalau kami boleh memindjam istilah Prof. Mr M. M. Djojodigoeno — buku jang menguraikan „Azas-azas dan peragaan” hukum adat ini akan berdjasa pada para mahasiswa dalam mempeladjar hukum adat.

Jogjakarta, Mei 1958.

Mr SOEJONO HADIDJOJO.

ANTAR KATA

(dari penulis)

Pendahuluan untuk peladjaran hukum-adat penduduk Pribumi Indonesia ini mentjoba dalam dua hal mengemukakan soal² umum. Pertama² dengan djalan memberikan tjorak² tanda-tjiri daripada lembaga² hukum Indonesia dan hubungan²-hukum, sedemikian rupa, sehingga asas² dan susunan hukum-adat Bumiputera dapat nampak keluar, pula sehingga perangai-chusus daripada hukum-adat dinjatakan oleh karenanja, kedua : dengan djalan menundjukkan faktor² jang mempengaruhi keadaan dan perubahan hukum-adat, pula dengan menudjukkan keadaan sosial jang memadjukan atau merintangi perkembangan tjorak² jang tertentu itu. Tetapi pendahuluan ini bermaksud djuga akan mengaitkan soal² umum tadi pada bentuk² gedjala² istimewa daripada lembaga², hubungan² dan perbuatan²; agar supaja dengan demikian seraja dapat sekedar memberikan gambaran tentang arti jang konkrit daripada soal jang diperikan setjara typologis, sehingga misalnja orang sekali tahu bahwa susunan-sanaksaudara berhukum ibu itu terutama penting buat hukum-adat Minangkabau, bahwa perdjandjian-pelihara (verzorgingscontract) rupa²nja adalah keistimewaan Minahasa, bahwa hak pertuanan (beschikkingsrecht) dan paruh-hasil (deelwinning) ternak terdapat dalam lingkungan rakjat Pribumi dalam hampir semua lingkungan²-hukum; tokoh² hukum setempat saban² disebut, baik sebagai misal daripada lembaga jang konkrit jang dimaksudkan oleh lukisan jang abstrakt, maupun untuk menu-turkan adanja tjorak² setempat dan simpangan² lokal. Hukum-adat positif daripada beberapa lingkungan kadang² ditundjukkan dengan djalan disebutkannja istilah² Pribumi; sebuah ichtisar jang agak pandjang lebar tentang susunan masjarakat²-hukum disadjikan sebagai peta-dasar daripada medan berlakunja hukum-adat pada pokoknja.

Sudah barang tentu dengan djalan demikian itu penjusunan pendahuluan peladjaran hukum-adat jang ringkas buat sebagian adalah soal memilih² dari bahan jang berlebih²-an apa jang patut diambil sebagai misal jang konkrit, dan apa jang tidak. Dengan sendirinja tjara bekerdja demikian itu mengandung tjatjat „sembarangan“, tapi tjatjat ini agak diperlunak karena kejakinan bahwa ini hanja mengenai gambaran sesuatu sadja, bukannya mengenai lukisannja sendiri jang typologis itu — walaupun tjatjat itu masih tetap berlaku terhadap lukisan jang tak lengkap daripada aturan² hukum setempat jang tidak termasuk dalam bentuk (type) tadi.

Hal terachir ini memang tak dapat dielakkan lagi dalam penjusunan sesuatu pendahuluan jang hendak tetap ringkas, tetapi segan² akan mengabaikan tjorak² jang konkrit.

Sudah semestinja pemilihan termaksud diatas tadi terpengaruh banjak oleh keadaan perpustakaan hukum-adat. Terhadap bagian Timur dari pada Nusantara (sebelah Timur-nja Sulawesi dan Bali, terketjuali Ambon dan Kepulauan Uliaser) hampir tidak ada sama sekali saduran setjara hukum-adat daripada tulisan² ethnologis oleh tenaga² jang terkenal ditempat² situ, sedangkan djarang terdapat keputusan² hakim jang diumumkan, pula bahan² jang disadjikan oleh para ethnografen jang tak berpendidikan dipandang dari sudut ethnologie djuga kurang heningnja. Walaupun demikian alangkah tidak tepatnja andaikata lingkungan²-hukum tadi diketjualikan dari lukisan susunan hukum-adat, meskipun dalam hal tidak mengetjualikannja sekarang ini, penundjukan² kelingkungan² situ itu harus dengan hati² sekali.

Buku ketjil ini disusun untuk mereka jang memulai beladjar hukum-adat, jaitu studen² rechts-hogeschool; ia bermaksud menjadjikan tjatatan² umum jang dapat menambah hasilnja peladjaran mengenai hukum-adat positif daripada suatu lingkungan-hukum jang tertentu; seraja ia bermaksud memberi petundjuk kepada para pekerdja² diluar, supaja mereka tahu akan adanja lingkungan umum, dalam mana hukum-adat — jang mereka hadapi (setjara kritis) dalam praktik mereka jang menudju kenjataan — dapat mereka tindjau sebagai suatu bentuk kedjala jang istimewa. Tak dapat diungkiri — melainkan hanya dapat disesalkan — bahwa pembahasan setjara abstrakt dan menurut sistim daripada tjorak² tjiri hukum-adat sebagaimana disini dikerdjakan ini, adalah laksana sebatang pohon djati dimusim kemarau. Tidak terdapat daun²nja dan bunga²-nja jang memberi warna dan bau harum serta kesegaran kepada sebuah naskah tentang hukum-adat jang hidup di salah satu masjarakat jang konkrit; jang terdapat ada, hanjalah batangnya, pertjabangan²-nja dan petundjuk² kearah kuntjup²-nja. Mengenai „pendahuluan atau peranaktirian“, „dapat dipakai atau tidak“, „berdjenis²-nja“ jang „mengedjutkan“ (atau tak mengedjutkan), „keunggulan atau tjatjatnja hukum-adat“, maka dalam buku ini tak sepatah katapun terdapat tentang itu.

Kenjataan telah memberi peladjaran, bahwa buat sementara hukum-perdata-tak-tertulis daripada Bumiputera tidak diganti; maka dari itu, djuga dipandang dari sudut jang praktis, tetap berguna pengadjaran masalah ini setjara teratur.

Pula tak ada sepatah katapun tertulis mengenai persamaannja atau tidak persamaannja hukum-adat dengan hukum Nederland, atau mengenai kesedjadjaran hukum-adat dengan hukum masjarakat² Afrika, Djerman, Ibrani atau lain²-nja. Sebagai objek-peladjaran jang wetenschappelijk maka perbandingan setjara tjermat antara dua lembaga² hukum itu — kedua²-nja sudah barang tentu harus difahami dalam hubungan bentuknja sendiri² seluruhnja —

berguna djuga. Perbandingan hukum-adat dengan hukum Nederland sedemikian itu sepanjang pengetahuan saja belum pernah diusahakan orang. Tapi tidak djarang diadakannja setjara kurang mendalam perbandingan lembaga² hukum atau aturan² hukum jang ditjabut keluar dari hubungan bentuknja masing²; perbandingan serupa itu mengakibatkan kesalah fahaman dan atjap kali penganiajaan. Sudah barang tentu sangat lain halnja soal betapa penting arti daripada ilmu hukum Barat beserta para ahli-hukum jang terdidik olehnja, untuk ilmu hukum-adat itu, arti mana karena besarnja sukar untuk dilampaui.

Bahan² untuk lukisan ini adalah tertimba dari „Adatrecht“-nja Van Vollenhoven dan karangan² tentang hukum-adat berikutnja beserta keputusan² jang diumumkan; sebagai penutup daripada bab ke-empatbelas akan dituturkan sedikit lebih landjut tentang pemakaian sumber² ini dan dalam bab jang terachir disadjikan sebuah ichtisar selajang pandang dari adanya tempat² jang menghasilkan bahan² tadi.

Beberapa bahan adalah terpetik dari naskah² studen²-tahun-kelima.

Hukum tertulis untuk Bumiputera (mengenai perwalian, perkawinan-Kristen, perkumpulan koöperasi, pelajaran laut dan sebagainya) tidak dibitjarakan dalam buku ini, melainkan hanja disebutkan sadja kadang².

Mengenai urutannja bab²: bab pertama — pada pokoknja membahas susunan masjarakat²-hukum — mungkin akan dapat disusul baik dengan bab tentang hukum-tanah, karena haknja masjarakat atas tanah dalam pada itu adalah terkemuka, maupun dengan bab tentang hukum-kesanaksaudaraan (dengan hukum-perkawinan dan hukum-waris) karena dengan demikian diperoleh sambungan pada apa jang telah dituturkan tentang factor genealogis daripada masjarakat² itu; mungkin baik dengan bab tentang hukum perhutangan (schuldenrecht), karena soal ini berpusat pada pertolongan bertimbal balik dalam lingkungan masjarakat², maupun kemudian dengan hukum-pelanggaran (delictenrecht), karena dalam pada itu masjarakatliah jang mempunjai arti jang mutlak.

Telah terpilih urutan masjarakat²-hukum, hukum-tanah, perdjandjian²-tanah dan perdjandjian² jang bersangkutan dengan tanah — hukum perhutangan — jajasan² — hukum-perseorangan — hukum-kesanaksaudaraan — hukum-perkawinan — hukum-waris — hukum-pelanggaran; hubungannja satu sama lain sebanjak mungkin diletakkan dengan djalan penundjukan² (verwijzingen). Peringatan² singkat pada penutup mengenai pengaruh lamanja waktu, bahasa-hukum dan pembentukan hukum, kesemuanja mengandung maksud untuk mengingatkan akan persoalan² umum jang bertalian dengan itu.

KATA PENGANTAR PADA TJETAKAN KE-EMPAT.

Sesudah dalam tahun 1941 diterbitkan tjetakan kedua jang tak berubah, maka dalam tahun 1946 buat ketiga kalinya dikeluarkan tjetakan baru, jang dengan tidak tepat disebut „tjetakan ke-dua jang tak berubah”. Maka dari itu penebitan ini adalah tjetakan jang ke-empat, jang tekst-nja tetap tak berubah pula, ketjuali tambahan sebuah daftar singkat daripada buku², jang diselenggarakan oleh Mr. H. Th. Chabot. Dari penjebutan buku² jang diumumkan sesudah terbitnja buah tangan Ter Haar dalam tahun 1939 itu, ternyata, bahwa peladjaran hukum-adat sedjak itu tidak berhenti. Dalam pada itu buku ini sendiri diterdjemahkan kedalam bahasa Inggris dan terdjemahannja itu pada tahun 1948 diumumkan di New York, dengan sebagai pendahuluan dibubuhi sebuah fatisal tentang latar-belakang ethnologis daripada hukum-adat, pula tentang kedudukan hukum-adat dalam organisasi urusan-hukum di Hindia Belanda dulu, fatisal mana ditulis oleh professor E. Adamson Hoebel dan A. Arthur Schiller. Demikianlah hasil-karya Ter Haar jang patut mendjadi tugu-peringatan terhadap Ter Haar ini dapat di hampiri oleh chalajak ramai jang dapat membatja dalam bahasa Inggris, hal mana sudah tentu akan memberi sumbangannja terhadap penjiaran pengertian tentang sistim hukum-adat, setjara lebih luas dari pada apa jang sudah mungkin sampai pada saat itu dulu.

Pada hemat saja buat sementara belum tiba waktunya untuk menindjau kembali buku ini. Memang benar, bahwa pendudukan Djepang selama tahun² 1942—1945 dan selama revolusi nasional berikutnya tidak membiarkan begitu sadja djalannja kehidupan-hukum Indonesia ini; sebaliknya: proses² kepribadian (individualisering), perbedaan²-an (differentiatie), dan persama-rataan (nivellering), pula proses pelenjapan (desintegratie) disana sini dimasjarakat Indonesia, tidak boleh tidak dipertjepat oleh karenanja, akan tetapi keonaran² politik dan sosial jang masih menimpa Indonesia pada sekarang ini belum mengidinkan penjelidikan setjara wetenschappelijk mengenai berlakunja kaidah²-hukum-adat jang baru.

Penerbitan tjetakan ulangan jang tak berubah ini menjebabkan keberatan² jang tertentu. Kita sadari sepenuh²-nja, bahwa istilah² jang terdapat dalam buku ini — dimana perkataan „inlandsch” atau „inheemsch” jang dipergunakan itu — sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan zamannja, bahkan menjinggung perasaan djua. Untuk ini diminta maafnja para pembatja. Selandjutnja „staatsrechtelijke geldingsgrondslag” (dasar berlakunja menurut ilmu tata-negara) sudah berubah sama sekali, sehingga halaman 11 — 14 dapat dianggap tak terpakai lagi seluruhnja. Tapi andaikata dulu harus me-

nunggu dibubuhinja perubahan² jang perlu, maka ini akan menje-
babkan banjak kelambatan, pada hal berhubung dengan kebutuhan
dikehendaki terbitnja kitab ini selekas mungkin.

Namun masih tetap berlaku apa jang ditulis oleh Prof. Logemann
dalam tjetakan „kedua jang tak berubah” — jang betulnja tjetakan
ketiga — ialah bahwa pandangan jang mahir daripada Ter Haar
tentang asas² dan susunan hukum-adat buat sementara tetap men-
djadi ukuran, sehingga sekarang ini tjetakan ulangan jang tak beru-
bah dapat dipertanggung-djawabkan djuga sepenuhnya.

Djanuari 1950.

S O E P O M O .

Demikian kata pengantar dalam tjetakan ke-empat pada pener-
bitan buku ini dalam bahasa aslinja, jaitu bahasa Belanda jang diter-
djemahkan kedalam bahasa Indonesia untuk pertama kali ini oleh
K. Ng. Soebakti Poesponoto, seorang jang mempunjai reputasi tje-
merlang sebagai pegawai negeri jang radjin dan setia, dan terdjamin
mengenai perwatakannja sebagai pedjuang kemerdekaan jang tidak
bertjatjat.

Disamping itu beliau djuga adalah dosen dari Perguruan Tinggi
„Hajam Wuruk” (Swasta) di Surabaya dalam mata-peladjaran hu-
kum adat, jang mendjamin segi-segi ke-ilmiahan dari tjara penter-
djemahan buku ini kedalam bahasa nasional kita.

Mengenai buku ini sendiri, rasanja penerbit tidak perlu menge-
mukakan lagi betapa penting artinja dibidang ilmu hukum bagi In-
donesia sendiri, sebab hal itu bukan sadja penting bagi mereka jang
ingin memperdalam pengetahuannja tentang ilmu hukum dan bagi
pedjabat-pedjabat kehakiman dan kepamongpradjaan jang dalam
pekerdjaannja seringkali menghadapi soal-soal jang bersangkutan
dengan hukum adat, bahkan buku ini penting djuga bagi dunia limu
pengetahuan hukum dunia, terbukti buku ini pada tahun 1948 telah
diterdjemahkan kedalam bahasa Inggeris oleh Prof. A. A. Schiller
dari Columbia University bersama-sama dengan Prof. E.A. Hoebel
dengan nama „Adat-law in Indonesia”, diterbitkan oleh Institute of
Pacific Relations.

Pada penerbitan dalam bahasa Indonesia jang pertama ini penja-
lin telah mengusahakan, untuk memasukkan kedalamnja istilah-isti-
lah baru. Walaupun demikian halnja, tidaklah menutup kesempatan
bagi penerbit untuk meminta maaf kepada para Guru Besar, para
Dosen, para Maha Siswa, para Hakim, para Djaksa, para Pamong
Pradja dan lain-lain jang menggunakan buku ini untuk memberikan
kuliah, untuk beladjar dan/atau untuk pegangan dalam menghadapi
masalah-masalah hukum dan kepamongpradjaan atas segala keku-
rangan jang selalu mungkin ada.

Djakarta, 1960.

PRADNJA PARAMITA.

ANTAR KATA (DARI PENULIS)	3
KATA PENGANTAR PADA TJETAKAN KE-EMPAT	6
ISI	8
FATSAL PENDAHULUAN	11
Dasar berlakunya hukum-adat menurut ketatanegaraan (dalil ²)	11
BAB PERTAMA: SUSUNAN RAKJAT	15
1. Masjarakat ² -hukum dalam lingkungan rakjat (tjo- rak ² umum (15) dan bentuk ² khusus (30))	15
2. Lingkungan radja ²	48
3. Pedagang ² sebagai orang ² luaran masjarakat	51
4. Pelantjaran susunan radja ² dan susunan guberne- men kedalam masjarakat ²	52
BAB KE-DUA: HAK ² ATAS TANAH	56
1. Hak pertuanan (beschikkingsrecht) daripada masjarakat ²	56
2. Hak ² perseorangan (dalam ketertiban hukum : masjarakat ² , keradjaan ² dan gubernemen)	73
BAB KE-TIGA: PERDJANDJIAN ² TANAH (GROND- TRANSAKTIES)	83
1. Pendirian dusun	83
2. Pembukaan tanah perseorangan	85
3. Perdjandjian ² tanah segi-dua didalam lingkungan masjarakat ² (gadai-tanah (93), djual tanah (99) menjewakan tanah (100))	87
4. Menjendirikan tanah	100
5. Penghadiahan (toeschenking) tanah	101
6. Penghibahan (toescheiding) tanah	101
7. Surat akte	102
8. Perdjandjian ² tanah diluar lingkungan masjarakat ²	103
BAB KE-EMPAT: PERDJANDJIAN ² JANG BERSANGKUTAN DENGAN TANAH	105
1. Perdjandjian paruh-hasil-tanam (deelbouw)	105
2. Séwa	108
3. Gabungan paruh-hasil tanam dan séwa dengan ga- dai tanah	109

4. Tanah sebagai pendjaminan (zekerheidstelling) ...	111
5. Perbuatan pura ² (schijn-handeling)	113
6. Penumpang rumah (bijwoner) dan penumpang pekarangan (opwoner)	115
7. Memberikan tanah dengan hak-pakai	115

BAB KE-LIMA: HUKUM PERHUTANGAN

(SCHULDENRECHT)	117
1. Hak ² atas rumah ² , tanaman ² , ternak, barang ²	117
2. Perbuatan krediet, tolong-menolong satu sama lain dan bertimbal balik	121
3. Perkumpulan ²	124
4. Perbuatan ² krediet perseorangan	126
5. Merugikan penagih ² hutang	130
6. Alat pengikat, tanda jang kelihatan	131

BAB KE-ENAM: JAJASAN² (STICHTINGEN)

1. Wakap (vrome stichting)	136
2. Jajasan (stichting)	137

BAB KE-TUDJUH: HUKUM-PERSEORANGAN

1. Keadanan hukum (rechtspersoonlijkheid) daripada perkumpulan ²	139
2. Perseorangan ² manusia (natuurlijke personen). Ketjakapan berbuat (handelingsbekwaamheid)	140

BAB KE-DELAPAN: HUKUM-KESANAKSAUDARAAN

1. Perhubungan diantara anak terhadap kedua orang- tuanya	144
2. Perhubungan diantara anak terhadap golongan ² sanaksaudara	147
3. Pemeliharaan anak ² piatu	151
4. Pengambilan-anak	153

BAB KE-SEMBILAN: HUKUM-PERKAWINAN

1. Bentuk ² perkawinan (perkawinan ² -pinang, — lari bersama, — bawa lari (159) ; perkawinan ² -djudjur, — mengabdi, — tukar-menukar, — mengganti dan perkawinan-meneruskan (164) ; perkawinan dengan pembayaran ² lain atau tanpa pembayaran ² (164) ; perkawinan-ambil-anak (164) ; perkawinan kanak ² (175) ; permaduan (175) ; pengaruh agama Islam dan agama Kristen atas pelaksanaan perkawinan (176))	158
---	-----

2. Pertjeraan perkawinan (pertjeraan menurut hukum-adat (179); pengaruhnja agama ² besar (183); lembaga ² Islam mengenai pertjeraan perkawinan (184); hukum Kristen mengenai pertjeraan perkawinan (187); akibat ² -nja perputusan perkawinan (188))	179
3. Hukum harta-benda-perkawinan (barang ² asal dari warisan (189); barang ² jang diperoleh atas usaha sendiri (190); harta-benda-perkawinan sebagai milik bersama diantara suami dan isteri (192); barang ² jang dihadiahkan kepada suami dan isteri bersama (196))	189
BAB KE-SEPULUH. HUKUM WARIS	197
1. Harta-peninggalan jang tak terbagi ²	198
2. Penghibahan ² dan wasiat ²	203
3. Pembagian harta-peninggalan	207
4. Ahli waris	208
5. Bahagian ² daripada harta-peninggalan	212
BAB KE-SEBELAS. HUKUM-PELANGGARAN (DELIK TENRECHT)	218
BAB KE-DUABELAS. PENGARUH LAMANJA WAKTU	226
BAB KE-TIGABELAS. BAHASA-HUKUM	230
BAB KE-EMPATBELAS. PEMBENTUKAN HUKUM-ADAT	235
BAB KE-LIMABELAS. KESUSASTERAAN HUKUM-ADAT	241
DAFTAR KETJIL DARIPADA SINGKATAN ²	253
DAFTAR DARI ADANJA LINGKUNGAN ² -HUKUM DAN ANAK ² - LINGKUNGAN-HUKUM	254
DAFTAR SOAL ²	258
DAFTAR ISTILAH ² PRIBUMI	261

FATSAL PENDAHULUAN.

DASAR DAN LINGKAR BERLAKUNJA HUKUM-ADAT MENURUT KETATANEGARAAN (DALIL²).

Mengenai artinja peraturan² wet, jang menentukan tempatnja dan batas²-nja hukum-adat (-sipil) orang² Indonesia dalam lingkungan keseluruhan hukum di Hindia Belanda, terdapatlah sedjak dulu sampai sekarang banjak perbedaan pendapat¹). Disana sini saja pernah ambil bagian dalam pembitjaraan mengenai masalah ini — tapi dalam buku ini hanya saja tjantumkan sadja pendapat saja dalam bentuk dalil². Bilamana saja harus membentangkan (mau tidak mau setjara pandjang lebar) alasan²-nja daripada apa jang harus berlaku dalam pada itu, maka tindakan saja ini akan mendjadi : menulis apa² „sekitar” hukum-adat, pada hal mestinja „tentang” hukum-adat, hal mana sebagaimana telah ditundjuk oleh Van Vollenhoven merupakan suatu penjakit daripada lebih dari sebuah karangan.

I. *Dalam alam peradilan-gubernemen untuk Bumiputera (Inlandse gouvernementsrechtspraak) (djuga seberapa djauh ia meliputi kaula² landschap) (landschaps-onderhorigen).*

1. Hukum-adat-sipil berlaku atas Bumiputera²) berdasarkan atas fatsal 131 ayat 6 Indische Staatsregeling, seberapa djauh hukum sipil itu tidak diganti dengan ordonnansi² (menurut wet) atau dengan hukum untuk golongan-Eropah (Europeanen-recht) jang sudah ditakluki menurut batas² jang sudah ditentukan oleh wet.

2. Ordonnansi² jang telah ditetapkan sebelum 1 Djanuari 1920 dan jang mengatur hukum-sipilnja Bumiputera, harus berupa pernjataan berlakunja (toepasselijk verklaring) undang²-untuk-golongan-Eropah — kalau perlu sesudahnja diubah — (fatsal 75 lama Regeringsreglement), itupun untuk sahnja dan untuk dapat diberlakukan oleh hakim atas Bumiputeri.

3. Ordonnantie² jang ditetapkan sesudah 1 Djanuari 1920 dan jang mengatur hukum-sipil Bumiputera harus :

1) Berhadapan dengan Van Vollenhoven dalam „Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië” mengenai lebih dari satu soal : dr. (mr) I. A. Nederburgh, Hoofdstukken over adatrecht 1933 ; bertentangan dengan itu „Nederburgh over adatrecht” dalam Ind.T.v.h.R. 138 (1933) hal. 723 ; repliek dari Nederburgh dalam T. 139 (1934) hal. 477 (Adat- tegen Westersch recht).

2) Golongan Timur Asing (Vreemde Oosterlingen) disini tidak dibitjarakan ; djuga „perhubungan² intergentiel” tidak.

a. berupa pernyataan berlakunya (toepasselijk verklaring) ketentuan²-hukum-untuk-golongan-Eropah — seberapa perlu sesudahnya diubah — atas golongan-Bumiputera; itupun bilamana terdorong oleh kebutuhan²-masjarakat jang ternyata ada dikalangan Bumiputera atau sebagian daripadanya;

b. Bumiputera dan golongan-Eropah diatur dengan peraturan² bersama djadi satu; itupun bilamana terdorong oleh kebutuhan²-masjarakat jang ternyata ada dikalangan Bumiputera atau sebagian daripadanya;

c. lain dari pada itu (bila tidak ternyata ada kebutuhan-masjarakat jang serupa itu dikalangan Bumiputera) dihormatilah hukum-adat, tapi dapat menjimpang dari itu bilamana terdorong oleh kepentingan umum atau oleh kebutuhan²-masjarakat jang ternyata ada dikalangan Bumiputera itu (fatsal 131 ayat 2 b Indische Staatsregeling).

4. Mengenai perintahnja wet supaya tidak diberlakukan hukum-adat bila ia bertentangan dengan „asas² jang sudah diakui umum daripada kepatutan dan keadilan” (fatsal 75 lama Regeringsreglement ayat 3 penutup) — dan perintahnja wet supaya dipakai sebagai pedoman: asas² umum daripada hukum-sipil dan hukum-dagang untuk golongan Eropah itupun bilamana harus diputus „perkara²” („zaken”) jang „tidak diatur” („niet geregeld”) dalam hukum-adat (fatsal 75 lama Regeringsreglement ayat 6), maka kedua perintah itu tidak berlaku lagi sesudah 1 Djanuari 1920 karena peraturan² itu oleh fatsal 131 ayat 6 Indische Staatsregeling tidak dipertahankan.

Mengenai takluk dalam anggapan (veronderstelde onderwerping) (fatsal 29 Staatsblad 1917 no. 12) mana kala Bumiputera menindakkan perbuatan-hukum jang diatur dalam hukumnja golongan Eropah tapi „tidak diatur” dalam hukum jang berlaku untuk golongannja, maka takluk sedemikian itu hanya berakibat bahwa lalu hukum tentang wissels, orderbriefjes dan surat² serupa itu berlaku atas Bumiputera itu.

II. *Dalam alam peradilan Pribumi (Inheemse rechtspraak) di daerah jang langsung dibawah perintah gubernemen (rechtstreeks bestuurd gebied).*

A. 5. Tentang alam ini jang meliputi — ketjuali pembatasan² oleh atau berdasarkan ordonnantie — penduduk Bumiputera Atjeh, Raja dan Singkel seluruhnja; Tapanuli Utara, Nias dan Padang Lawas; Korintji dan Mentawai; Benkulen luar ibu kota; Palembang luar ibu kota; Djambi luar ibu kota; bekas Kesultanan Lingga-Riau; Kalimantan Barat dibagian jang langsung dibawah pe-

rintah gubernemen, luar ibu kota ; Mahakam Hulu dan Pasir ; Gorontalo ; Laikang (ditambah beberapa masjarakat²-adat) ; Maluku Ternate, Banda, Ambon dan kepulauan Oliaser) dan Lombok, maka disitu jang berlaku ialah hukum-sipil-adat, hukum-pidana-adat dan hukum-atjara-adat, sepandjang tidak diganti dengan „alge-atjara) tidak diganti dengan „residentsverordeningen”, kesemuanja jang dengan tegas dinjatakan berlaku dalam lingkungan² situ (fatsal 130 dan 131 ayat 5 „Indische Staatsregeling”).

6. Ordonnantie tertanggal 18 Februari 1932 Staatsblad no. 80 jang terachir diubah dengan ordonnantie tertanggal 23 Djuni 1938 staatsblad no. 371 dengan daftar²-nja dan peraturan²-pelaksanannya (residentsverordeningen) mengatur lingkaran (omvang) berlakunya hukum-adat seluruhnja.

B. 7. Menurut hukum tata-negara maka peradilan-dusun (dorpsjustitie) jang dikaitkan pada peradilan gubernemen adalah suatu bagian daripada peradilan Pribumi dalam daerah jang langsung dibawah perintah gubernemen ; fatsal 3 a daripada „Reglement op de rechterlijke organisatie” jang ditambahkan dengan djalalan ordonnantie tertanggal 9 Maart 1935 staatsblad No. 102 memberi kesempatan untuk berlakunya peradilan-dusun itu, dengan tiada mengurangi keutuhan kekuasaan mengadili (rechtsmacht) hakim² gubernemen ; dalam lingkungan peradilan-dusun itu jang berlaku hanjalah hukum-adat.

III. Dalam alam peradilan-landschap (landschapsrechtspraak).

8. Mengenai alam ini — jang meliputi :

a. kaula²-landschap (landsschapsonderhorigen) daripada landschap² dalam Hindia Belanda, ketjuali bilamana berdasarkan kontrakt atau menurut „zelfbestuursregelen” kekuasaan-mengadili atas kaula² itu diserahkan kepada hakim-gubernemen (didaerah² swapradja di Djawa hampir semua kekuasaan-mengadili diserahkan kepada hakim-gubernemen,¹⁾ dan dilain² tempat kekuasaan-mengadili dalam hal² perketjualian sadja jang diserahkannya) ;

b. kaula² gubernemen (landsonderhorigen) dalam dua-tiga hal² perketjualian, jaitu bilamana mereka dulu pada waktu permulaan pemeriksaan perkara adalah termasuk kaula landschap atau bilamana perkara itu mengenai tanah² milik jasan, mengenai rumah² dan tanaman² jang lebih dari satu tahun umurnja (overjarig), benda² mana kesemuanja jang terletak didaerah landschap situ ; — maka jang berlaku dalam alam itu ialah hukum-sipil-adat, hukum-pidana-adat dan hukum-atjara-adat (kadang² dalam bentuk „zelf-

1) Peraturan istimewa mengenai Atjeh, Kalimantan Barat, landschap² Manado, Ternate sudah hampir tiba saatnja untuk dihapuskan (Desember 1938).

bestuursverordeningen), sepanjang tidak diganti dengan ordonnantie² — jang dengan tegas dan berdasarkan wenang jang diberikan kepada gubernemen menurut „kontrakt” atau „konte verklaring” (kontrakt pendek) — jang dimjatakan berlaku buat alam situ; dan mengenai hukum-pidana dan hukum-atjara sepanjang tidak diganti dengan „residentsverordeningen” (fatsal² 12 dan 13 „Zelfbestuursregelen 1938” dan ketentuan² jang sesuai dengan itu dalam „kontrakt² pandjang”; bandingkanlah fatsal 21 ajat 2 Indische Staatsregeling).

IV. *Dalam alam peradilan agama (godsdiensstige rechtspraak).*

9. Hakim² peradilan agama jang berkekuasaan-mengadili — kekuasaan mana berbatasan dengan kekuasaan hakim² peradilan gubernemen — terdapat di Djawa dan Madura, di-ibu² kota Palembang dan Djambi, dikota²-pantai di Kalimantan dan di Ternate. Kekuasaan-mengadili daripada „sjarat²” di Sulawesi Selatan tidak diakui (lagi) oleh jurisprudentie; bagaimana halnja di Padang dan di Ambon, maka rupa²-nja tiada kepastian.

10. Dalam alam hakim² ini, jang mengadili orang² Islam — sepanjang menurut hukum-adatnja sekarang dan ordonnantie mengidinkan bahwa perkara²-nja diadili oleh seorang hakim peradilan agama — jang berlaku bukannya hukum-sipil-adat buat perkara²-nja itu, tapi hukum fikih Islam, jang walaupun demikian, dalam beberapa soal telah terpungut (opgenomen) dalam hukum-adat (fatsal 134 ajat 2 Indische Staatsregeling).

11. Pada sekarang ini hakim peradilan agama di Djawa dan di Kalimantan Tenggara itu berkuasa mengadili hanja perkara² jang harus diputus menurut hukum-perkawinan (huwelijksrecht), ketjual bilamana Burgerlijk Wetboek berlaku atas perkara itu (fatsal 2 a daripada staatsblad 1882 No. 152 (Djawa) jang telah ditambah dengan staatsblad 1937 No. 116, dan fatsal 3 daripada staatsblad 1937 No. 638 (Kalimantan Tenggara).

12. Didaerah² luar Djawa lain²-nja maka kekuasaan-mengadili daripada hakim peradilan-agama itu terdiri dari mengadili perkara² antara orang² Islam satu sama lain, jang menurut hukum-adat dalam masing² lingkungannja harus diadili oleh hakim² peradilan agama. Biasanja perkara² itu adalah perkara² jang mestinja diadili menurut hukum-perkawinan, hukum-waris dan hukum-wakap.

BAB PERTAMA. SUSUNAN RAKJAT.

1. MASJARAKAT²-HUKUM DIKALANGAN RAKJAT.

A. *Tjorak² umum.*

Bilamana orang meneropong suku bangsa Indonesia manapun djuga, maka tampaklah dimatanja dilapisan bagian bawah jang amat luasnja, suatu masjarakat jang terdiri dari gerombolan² jang bertalian satu sama lain; terhadap alam jang tak kelihatan mata, terhadap dunia luar dan terhadap alam kebendaan, maka mereka bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga untuk mendapat gambaran jang sedjelas²-nja gerombolan² tadi dapat disebut masjarakat²-hukum (*rechtsgemeenschappen*). Dalam pergaulan hukum maka mereka jang merasa mendjadi anggauta daripada ikatan² itu bersikap dan bertindak sebagai suatu kesatuan; beberapa orang berbuat apa², semuanya beruntung atau merugi; adalah suatu aturan batin jang menjejabkan, bahwa beberapa orang atau golongan orang mempunyai hak-mendahulu, hak-lebih atau kekuasaan: adalah barang², tanah, air, tanaman², kuil² dan bangunan² jang harus dipelihara bersama² oleh anggauta²-ikatan, jang harus dipertahankan oleh mereka bersama² dan didjaga kebersihannja untuk kepentingan kekuasaan² gaib, jang hanja mereka sendiri jang mengambil manfaatnja dengan mengetjualikan lain² orang: terdjadinja masjarakat itu dialaminja sebagai takdir alam, sebagai sesuatu kenjataan daripada hukum gaib; tiada seorang jang mempunyai pikiran atau timbul angan²-nja akan kemungkinan membubarkan gerombolan itu; jang mungkin buat orang seorang ialah hanja keluar dari gerombolan atau melepaskan diri dari rangkaian, itupun hanja mungkin terhadap persekutuan² jang adanja tergantung dari daerahnja.

Ilmu ethnologie pada zaman sekarang telah dapat menemukan gambaran jang djelas mengenai faham² asli Pribumi tentang kesatuan jang kokoh dan teratur daripada masjarakat² itu, hal mana kadang² dilambangkan dengan wujud manusia dengan dua bagiannja (*tweedelingen*), empat-bagiannja (*vierdelingen*) dan tjara membeda²-kan lainnja, dimana orang² pendjabat pangkat ditetapkan kedudukannja dalam organisasi; ilmu tadi amat besar artinja untuk memahami susunan awal-mula dipurbakala daripada masjarakat² Indonesia jang bergandengan dengan membeda²-annja (*klassifikatie*) alam-besar (*kosmos*) maupun alam manusia.

Benda² keramat daripada masjarakat² misalnja *punèn*-nja orang² Pagai, *pusaka-dusun* (*pusaka laman*) daripada orang² Dajak-Ngadju dan Dajak-Klemantan, sendjata²-nja orang Toradja, per-

hiasan² pusaka di Sulawesi Selatan, batu² daripada bagian²-clan di Ambon, *marapu* di Sumba, *lontar-dêsa* di Bali dan lain²-nja lagi, maka itu semuanya adalah perumahan² berwudjud benda atau perwudjudan² daripada daja-hidup, ialah daja sakti daripada masjakat²; kesemuanya itu adalah tanda² jang njata daripada kesatuan-masyarakat jang betul² ada; begitu djuga² rumah-persekutuan sopo (Batak), *sesat* (Lampung), *balai* (Melaju), *bailéo* (Maluku), *balè* (Sunda) dan seterusnya, pula kadang² djuga perahu-masyarakat *bélan* (dikepulauan Kei dan Aru).

Terhadap lebih dari selingkungan-hukum (Kalimantan, Bali, Batak) maka pada achir² ini saban² perhatian ditudjukan kepada maksud-pokok jang bersifat peribadatan daripada masyarakat² itu, ialah bahwa mereka merasa mendjadi anggauta perikatan itu karena merasa sama² berwadjib menindakkan ibadat-sihir (religieus-magische verrichtingen) itu. Dalam masyarakat² itu ternjata, bahwa persambungan kekerabatan, jaitu hubungan antara mereka berasa² dari keturunan satu leluhur, ada kalanja berarti mutlak atau penting, ada kalanja tak seberapa artinja atau sama sekali tak berarti, terhadap bentuk susunan masyarakat² itu. Disatu fihak masyarakat ketjil² itu — beserta penghulu² rakjat-nja dan ketua² kerabatnja, pula atjapkali beserta sendi²-nja jang teratur berupa kelas² — nampak kepada kita sebagai masyarakat²-hukum; disitulah hukum-adat sebagai endapan daripada kenjataan² sosial, dipungut daripadanya dan oleh karenanya didukungnja pula; disitu pulalah hukum-adat dalam proses abadi dibentuk dan dipelihara oleh dan dalam keputusan² pemegang² kekuasaan (penghulu-rakjat dan rapat²) jang didjatuhkan atas sesuatu tindakan-hukum atau atas sesuatu perselisihan.

Dilain fihak maka masyarakat² itu dengan hak² atas tanahnja, atas air dan tanaman²-nja, atas bangunan²-nja, benda² keramat dan lain² barang² miliknja, nampak pada kita sebagai subjek²-hukum (rechtssubjecten) jang turut serta dalam pergaulan hukum.

Bila dirumuskan sesingkat²-nja maka persekutuan² itu dapat disebut: gerombolan² jang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekajaan sendiri berupa benda jang kelihatan dan tidak kelihatan mata.

Untuk menginsjafi bagaimana bentuk dan susunan persekutuan²-hukum dikalangan rakjat di Nusantara ini, maka terutama orang harus tahu akan arti faktor² territorial (daerah) dan genealogis (keturunan) bagi timbulnja dan kelangsungannja masyarakat² itu.

Masyarakat²-hukum, dimana faktor territorial, jaitu

adanya bersama² terikat pada sesuatu daerah jang tertentu — belum atau tidak penting baginja, adalah jarang terdapat dan dimana ada, keadaannya tak berarti. Suatu misal jang tepat untuk itu ialah suku-bangsa Gajo, terdiri dari clan² jang berdiam berserak dan hanya terikat satu sama lain oleh hubungan² clan. Kini rupa²-nja keadaan sedemikian itu berubah. Dekalangan banjak suku² bangsa ada tanda² bahwa mereka djuga terikat oleh ikatan² clan, lepas apakah mereka mendiami daerah jang sama atau tidak. Masjarakat² sedemikian itu mungkin adalah masjarakat² territorial belaka, tapi bukannya masjarakat²-hukum, bagaimanapun mungkin pentingnja dipandang dari sudut lain. Atau, bila sebutan „bukan masjarakat²-hukum” ini agak keterlaluan, dapat djuga disebut masjarakat²-hukum (*rechtsgemeenschappen*) tapi jang amat terbelakang kedudukannya sosial sebagai masjarakat-hukum; misalnja ada tindakan keluar bersama² dan teratur hanya pada hari-peringatan sesama bapa leluhur jang makamnja merupakan tanda persambungan bagi mereka semuanya.

Sebaliknya masjarakat², dimana faktor genealogis tidak berarti — jaitu faktor terikatnja satu sama lain karena keturunan jang sama — dikepulauan Indonesia ini ada banjak. *Désa* di Jawa, Sunda, Madura, Bali, *gampong* (*meunasah*) di Atjeh, *dusun*² didaerah Melaju, di Bangka dan Belitung, sebagian daripada gabungan² wilajah di Sumatra Selatan, gabungan² *dusun* dan wilajah² di Sulawesi Selatan, *negorij* di Minahasa dan di Ambon — masjarakat² itu semata² bersifat territorial, walaupun hubungannya dengan susunan genealogis dipelbagai masjarakat itu ada terang.

Terhadap masjarakat² territorial ini harap diperhatikan sekarang djuga (lihatlah pula halaman 27) bahwa orang², jang bersama² mendiami *dusun* atau gabungan-wilajah, mereka itu djuga merupakan suatu *g o l o n g a n*, suatu *k e s a t u a n*, dengan kekuasaan pembelaannya keluar dan dengan penjusunannya kedalam. Seseorang jang buat sementara berada dalam rantauan dapat tetap menjadi anggota masjarakat tadi; seseorang jang datang dari luaran dapat djuga masuk menjadi anggota golongan itu, tapi untuk ini tidak tjukup ia datang bertempat tinggal begitu saja dalam *dusun*, melainkan orang itu harus djuga diidinkan masuk dalam golongan dimasjarakat (territorial) itu dan orang itu harus dipungut masuk kedalam ikatannya, jang dipelihara dengan djalan tolong menolong satu sama lain. Kadang² dan terhadap beberapa orang (rekanan sendiri) masuknja itu ada mudah, ditempat lain dan terhadap orang² lain (orang² luaran) masuknja ada sukar atau tak mungkin sama sekali. Soal sudah menjadinja anggota masjarakat „sedjak dulu kala”, djadi djuga terhitung menurut ukuran

faktor kekerabatan dan keturunan, adalah faktor penting buat kedudukan anggota itu dalam masyarakat teritorial ini.

Kedua faktor ini, ialah faktor genealogis dan faktor teritorial, menetapkan bentuk dan susunan *uma* di Mentawai, *euri* di Nias, *huta* dan *kuria* di Batak, *nagari* di Minangkabau, *marga* dan *dusun* disebagian Sumatra Selatan, suku² di Kalimantan, *dusun*² dan gabungan² wilayah di Toradja, di Timur Besar dan kepulauan Timor. Maka dari itu penting sekali saban² mengenal hasil paduan setempat daripada kedua faktor tadi.

Sebelum melukiskan beberapa misal jang kongkrit, maka dapat ditetapkan garis² besar, titik² perbedaan umum dan persamaan umum, agar supaya faktor genealogis dan faktor teritorial itu lebih terang dapat dibeda²-kan dan selanjutnya dapat ditetapkan.

Mengenai ikatan genealogis timbullah pertama² kebalikan susunan vaderrechtelijk (hukum keturunan fihak bapa) dan moederrechtelijk (hukum keturunan fihak ibu), susunan parentaal (hukum keturunan fihak² bapa dan ibu) dan alternerend (hukum keturunan fihak bapa dan fihak ibu, berganti²). (Batjalah disebagian hukum kekerabatan, halaman 147 dst.).

Susunan berhukum bapa (vaderrechtelijk) ialah suatu aturan, dimana persamaan keturunan (keturunan sedjati atau keturunan dalam anggapan belaka) dari sesama bapa leluhur menetapkan termasuk golongan kaum mana seseorang dalam susunan kekerabatannya, tergolong *clan* atau *bagian-clan* mana; dan golongan² itu hidup sebagai kesatuan² sosial dan oleh karenanya dapat dikenalnya.

Nias, Gajo, Batak dan sebagian penduduk Lampung adalah misal jang tepat buat susunan vaderrechtelijk, di Bali susunan sedemikian itu masih benar² kentara njata, di Maluku dan dikepulauan Timor ia banjak terdapat pula.

Berhadapan dengan itu (di Minangkabau, Krintji, Semendo dan dikalangan sementara suku²-bangsa ketjil² di Timur Besar) terdapatlah susunan berhukum ibu (moederrechtelijk) (hukum keturunan dari fihak ibu); disini jang mendjadi patokan buat tempatnya dalam ikatan ialah persamaan keturunan menurut garis perempuan dari satu ibu-leluhur, dan golongan jang terikat menurut sistim itu tadi, ialah bagian-clan, adalah terbesar artinja bagi kehidupan hukum. Pada susunan kerabat satu-segi (*eenzijdig*) itu atjap kali terdapat aturan *exogamie*, jaitu larangan berkawin dengan sesama anggota clan atau bagian-clan. Bilamana dalam sesuatu masyarakat terdapat kedua matjam susunan kerabat itu, jang teratur sosial dan sebagai golongan dapat dikenal terang, sehingga masing² anggota baik termasuk clan patrilineal (clan bapa) maupun termasuk clan matri-

lineal (clan ibu), maka keadaan sedemikian itu dalam hukum-adat dapat disebut „dubbel-unilateraal”; mungkin buat Indonesia misal buat itu ialah kepulauan Timor (Mollo di Timor, suku Kodi di Sumba ?) ; di Melanesia misal² itu akan lebih mudah terdapat.

Berhadapan dengan itu, maka dilain² tempat, misalnja dibanjak daerah di Kalimantan dan Sulawesi, faktor genealogis tidak terdapat disusunan kerabat satu-segi (di-clan²), akan tetapi terdapat disusunan dua-segi (tweezijdig) atau disusunan parenteel; disitu maka golongan² kerabat baik dari fihak bapa maupun dari fihak ibu umumnja sama artinja bagi perhubungan² hukum.

Dengan djalan „endogamie”, jaitu berkawin dalam sukunja sendiri (ini bukannya suatu keharusan, melainkan suatu kebiasaan) maka susunan² parenteel sedemikian itu dapat mempertahankan ikatan²-nja (kearah semua fihak) didalam suku sendiri. Pada akhirnya: didaerah seperti Redjang, maka dasar kekerabatan bukannya patrilineel dan bukannya parenteel, akan tetapi dasarnja tergantung dari bentuk perkawinan; jaitu bentuk perkawinan dimana anak termasuk clan-nja bapa (oleh karenanja djuga disebut perkawinan hukum bapa = vaderrechtelijk huwelijk) hal mana sama seringnja terdjadi dengan bentuk perkawinan, dimana anak termasuk clan-nja ibu (susunan-kerabat satu-segi „berganti²” = alternerend eenzijdige verwantenorde, halaman 150); disamping itu ada lagi bentuk perkawinan ketiga, dimana anak sama kedudukannya terhadap clan-nja bapa dan clan-nja ibu (tambahan lagi dalam keadaan² jang tertentu memindahkan anak dari clan-nja ibu ke clan-nja bapa djuga mungkin, hal. 157. Djuga dipulau² disebelah Timur terdapat beberapa misal daripada susunan „berganti²” (alternerend) itu).

Mengenai susunan territorial dapat digambarkan dengan membeda²-kan tiga bagian, hal mana tidak berarti membuat tiga golongan jang akan dapat meliputi keadaan senjata²-nja, melainkan tiga bagian itu berarti tiga pusat jang masing² mendjadi pusatnja pelbagai bentuk² tetap dan bentuk² peralihan. Ketiga djenis itu ialah: masjarakat-dusun, masjarakat-wilajah dan gabungan-dusun² (de dorpsgemeenschap, de streekgemeenschap en de dorpenbond).

Bilamana satu tempat kediaman ketjil menghimpun ummat manusia djadi satu ditempat situ sendiri — mungkin dengan meliputi perkampungan² (pedukuhan²) jang berdiri sendiri dan agak djauh dan terpentjil letaknja — dan bilamana dalam pada itu penghulu masjarakat dan pendjabat-masjarakat lainnja semua njatanja

bertempat tinggal dipusat kedudukan ditempat situ djuga djadi satu, maka disitulah ada masjarakat-dusun jang tepat, ialah misal-nja : *désa* di Djawa dan Bali.

Bilamana saban² disesuatu daerah ada beberapa tempat kediaman ketjil, walaupun sedikit banjak mempunjai kedaulatan dan pemerintahan kepala²-nja sendiri sedjenis desa tadi, akan tetapi merupakan bagian² daripada satu masjarakat jang meliputi bagian² itu semuanya, maka disinilah terwujudnja masjarakat-wilajah (*streek-gemeenschap*) jang tepat; ia mempunjai batas² sendiri, pemerintahan sendiri, pula mempunjai „hak-pertuanan“ (*beschik-kingsrecht*) atas tanah jang belum dibuka sedjak dulu kala, terletak ditengah² dan sekelilingnja ladang² jang masih dikerdjakan atau sudah ditinggalkan; didalam lingkungannja maka dusun² jang sam-pai tingkatan jang tertentu berdiri sendiri, mempunjai kedudukan dalam organisasi seluruhnja, termasuk dusun² tadi baik tempat kediaman jang pertama, ialah induk-dusun, maupun dusun² jang pada tingkatan achirnja berasal dari induk-dusun itu, ialah dusun bawahan, misal² dari pada masjarakat²-wilajah (*streek-gemeenschap*) jaitu : *kuria* beserta *huta*-nja di Angkola atau Mandailing, *marga* beserta *dusun*-nja di Sumatra Selatan.

Bilamana masjarakat²-dusun jang mempunjai pemerintahan dan daerah sendiri letaknja bersandingan satu sama lain dan bersama mengadakan perserikatan untuk memelihara kepentingan² bersama (membikin saluran air, pertahanan bersama melawan musuh, peradilan) atau memelihara hubungan satu sama lain berdasarkan atas asal mereka, dalam pada itu ada pemerintahannja jang bersifat kerja-sama dengan pemerintahan² dusun itu, sedangkan tak ada hak-pertuanan (*beschik-kingsrecht*) pada perserikatan itu, maka itulah jang disebut gabungan-dusun² (*dorpenbond*); misalnja didaerah Batak bagian tengah.

Djadi, dusun (jang ketjil) itu diantara tiga bentuk tadi adalah suatu pusat hidup daripada masjarakat ummat manusia jang berdiri sendiri atau terikat dalam persekutuan jang lebih tinggi atau memelihara hubungan dengan lain² masjarakat² jang sedjadar, setjara tak tetap, untuk kepentingan bersama. Mengenai bentuk apa jang dipilih masjarakat² ketjil² itu dalam hal ini, maka faktor ikatan genealogis daripada golongan² penduduk itu besar artinja.

Karena beberapa keadaan maka dapat terdjadi bahwa bentuk² tadi tidak menotjoki keadaan² jang senjatanja dan pertjampuran tangan dari luar menjebabkna bentuk² menurut hukum-adat itu sukar akan dikenal kembali.

Disatu fihak terdapat gabungan²-wilajah, jang terdiri dari satu induk-daerah-kediaman dari mana lain² tempat-kedudukan itu me-

njiar, akan tetapi terhadap si-induk tetap bersikap sebagai muda terhadap tua ; dilain fihak terdapat djuga dusun² jang pedukuhan²-nja mendjadi sebesar dusun² sendiri, tapi tak sampai mendjadi sedjadar penuh terhadapnja. Dalam hal ini, maka *nagari* di Minangkabau mirip seperti *laras* di Minangkabau Selatan dulu (suatu gabungan-wilajah). Dusun² jang digabungkan (lain misal) lambat laun disebut dusun pula, tapi pada hakekatnja mirip seperti gabungan-wilajah setjara buatan. Masjarakat² ketjil² jang dalam lingkungannja penduduknja berdiam tersiar dalam kelompok² rumah² ketjil, rumah² halaman-petani — seperti di Madura — menurut adatnja disebut dhisa (dorp), sebagaimana di Sunda gabungan-wilajah djuga disebut *désa*. Sebutan² *désa* dan *nagari* dalam arti etymologis adalah mengandung maksud gabungan²-wilajah (*streek-gemeenschappen*). Gabungan²-wilajah jang diakui sebagai swapradja, lalu disebut *landschap*² (dan timbullah sebegitu banjak *landschap*² ketjil²). Perlingkupan² jang tidak banjak setjara lalim meliputi gabungan²-wilajah adalah keradjaan² dan *landschap*² jang besar ; djuga antara kedua²-nja ini tidak ada batasnja jang tegas.

Dengan mengingat kedua pangkal-pengertian ini : beraneka-warnanja susunan genealogis dan beraneka-warnanja penggolongan² teritorial, maka pada sekarang dapat dibentangkan lebih landjut k e r d j a - s a m a k e d u a f a k t o r ² itu jang besar artinja sehingga merupakan bentuk dan tjorak daripada masjarakat tersebut diatas tadi. Kenyataannja adalah begitu rupa, sehingga batas² daerah teritorial itu — biasanja batas² alam — (boleh dikatakan) memotong golongan² kerabat dalam territoir itu dari golongan² kerabat ditempat² lain ; masjarakat²-hukum genealogis² tetap adalah bagian²-clan jang berdiri dan terbatas oleh terikatnja bersama² dengan bumi didusunnja sendiri atau daerahnja sendiri, suatu ikatan jang malahan terus berlaku atas mereka jang sudah pergi dari tempat situ sampai sangat lamanja tapi jang dalam pokoknja berarti hanja buat sementara sadja. Dilain fihak, maka adanja bersama² terikat pada bumi dusunnja atau daerahnja itulah jang menghimpun golongan²-kerabat jang bersama berdiam disitu tapi satu sama lain bukan sanak saudara (bagian² dari pelbagai clan) mendjadi satu masjarakat-hukum atau satu kesatuan. Clan² itu seluruhnja bukannya masjarakat²-hukum, tidak bertindak sebagai kesatuan, tidak mempunyai pemerintahan atau kekajaan sendiri, melainkan mereka adalah golongan-kerabat jang ber-segi-satu (*eenzijdig*) susunan²-nja dan berdiam terpentjar diseluruh wilajah, hanja kentara dari nama²-nja jang berhubungan dengan

clongeng²-nja keramat mengenai asalnja dan pertumbuhannja (halaman 17). Demikianlah halnja di Nias, Batak, Minangkabau, Redjang dan lain² tempat. Namun jang merupakan *masjarakat-hukum* (*rechtsgemeenschap*) ialah bagian²-clan jang berada didusun atau didaerah, jang menjatakan berasalnja dari *pembangun* (*stichter*) atau *pembangun²* dusun atau daerah situ atau dari leluhur jang sesudahnja pembangunan telah diidinkan berdiam didusun atau didaerah itu sebagai orang baru. Orang² sesama clan dari lain² tempat mungkin dengan mudah dapat dipungut masuk dalam susunannja, ialah karena mereka adalah sanak-saudara sedari awal mulanja, akan tetapi sebelum mereka dipungut masuk, maka mereka tetap anggauta dari golongannja sendiri ditempat semula, bukannya termasuk digolongan kerabat didusun situ.

Kerdjasama tersebut diatas, ialah daripada faktor geneologis dan faktor territorial mengakibatkan adanja pelbagai djenis susunan-rakjat, susunan² mana kadang² timbul satu sama lain berdampingan disatu daerah; hal ini akan dapat diterangkan dengan singkat lebih lanjut.

Pertama² bagian-clan ialah sebagai satu²-nja golongan jang mendiami sesuatu wilajah (*territoir*) jang terbatas. Dalam pada itu pada umumnja ada pergaulan jang ramai dengan bagian²clan tetangga (walaupun andaikata karena *exogamie sadja*), tapi kesatuan daripada susunan-rakjat, daripada dusun atau daerah hanya terdapat pada bagian-clan diwilajah situ sendiri. Misalnja: barangkali dipedalaman pulau Buru.

Selanjutnja bagian-clan „dalam wilajahnja sendiri” tapi berdiam disitu bersama dengan golongan² atau perseorangan² dari clan lain (disebabkan oleh pergaulan clan² dan untuk memadjukan pergaulan itu), jaitu mereka jang diwilajah situ tergolong penduduk kelas-dua. Diperlakukan sebagai kelas-dua ialah dalam hal turut sertanja dalam pemerintahan wilajah situ, begitu djuga terhadap hak² atas tanah; dalam hal² lain mereka dihargai sebagai sesama anggauta jang dibutuhkan. Misal²-nja orang² Batak-Toba dengan *marga*-nja jang meradja (*regerende marga*) dan pelbagai penduduk-penumpangnja (penduduk-penumpang daripada *marga*-perkawinan dan *marga* lain) dan orang² Redjang dengan perserikatan² daerahnja, dimana mereka se-clan (*bang mégo*) mewudjudkan satu masjarakat bersama² orang² golongan semendanja (*aangehuwden*) dan orang² luaran lainnja jang sudah menetap disitu (mereka disini tidak dapat dikatakan lagi dikurangi tingkat kedudukannja) dalam masjarakat² sedemikian itu adalah tiga matjam rangkaian: rangkaian sanak²-saudara, rangkaian sanak²-saudara beserta golongan semendanja, achirnja rangkaian sesama anggauta dusun.

Selandjutnja : bagian-clan dalam daerahnja sendiri sebagai penduduk pertama, tapi disampingnja dan diatasnja ada suatu bagian-clan asing, ang mendatang dari luar, merebut kekuasaan dan memerintah sebagai golongan jang berkuasa (kelas penghulu = *hoofdenstand*) dan jang tetap asing terhadap perikatan golongan penduduk pertama dengan tanahnja, dan penghulu dari golongan inilah mendapat (tetap memegang) djabatn „wali tanah” (= *grondvoogd*, hal. 69). Misalnja : Sumba Tengah dan Sumba Timur.

Keempat : pelbagai bagian²-clan jang satu sama lain bukan sanak-saudara (atau mungkin menurut dongeng-asal-usul masih sanak-saudara tapi tak tjukup berartinja buat aturan *exogamie*), djadi anak tjutju pembuka² tanah jang pertama, jang masing² pertama kali menduduki bagian² tanah sesudahnja oleh pembuka² tanah itu dibagi²kannja diantara mereka sendiri, dengan demikian mereka merupakan satu masjarakat dengan berdaerah gabungan *territoir*²-clan itu, jang berbatasan satu sama lain (atau jang daerahnja dibagi habis mendjadi *territoir*²clan). Misal² : beberapa *nagari* di Minangkabau, jang terdiri dari *daerah*²-*suku* ; beberapa *marga* di Bengkulu.

Kelima : pelbagai bagian²-clain jang tidak bersanak-saudara satu sama lain, jang bersama² mewudjudkan suatu masjarakat atas satu daerah jang tak terbagi². Misal² : beberapa *nagari* di Minangkabau dan *dusun* di Redjang.

Masjarakat-hukum jang dapat disebut kesatuan daripada susunan-rakjat menurut misal² tersebut diatas teranglah senantiasa teritorial-genealogis tjampuran. Orang dari luar jang mendatang dapat masuk golongan masjarakat itu hanja dengan perbuatan rangkap jang tak terpisah satu sama lain, jaitu : menggabungkan diri dalam ikatan genealogis *Pirbumi* ditambah : berdiam di-*territoir* situ. Pertalian kesanak-saudaraan dan pertalian dengan tanah kedua²-nja adalah penting terhadap susunan masjarakat itu.

Dimana susunan kerabat segi-satu tak terdapat, djadi dimana tak ada bentukan clan, tapi kekerabatannja berlaku baik menurut keturunan bapa maupun keturunan ibu, maka disana (Kalimantan, Sulawesi Tengah) terdapat masjarakat-kerabat (*suku* atau kerabat jang berdaerah sendiri, kerabat itu berdiri sendiri atau dibawahkan *suku*). *) Demikian djuga halnja bilamana orang² jang bukan

*) Dalam tulisan ini untuk golongan kerabat besar segi-satu jang tak tersusun sebagai masjarakat, dipakai sebutan „clan” dan buat bagian²-nja, sebutan : „bagian-clan”, sedangkan untuk golongan besar — *parenteel* — segidua — *genea-*

sanak-saudara karena lamanja berdiam disesuatu suku dapat memperoleh kedudukan dimasyarakat situ (hal mana disebut „men-teritorial-kan” masyarakat, ini karena sebagai perseorangan dengan perseorangan² lainnja bersama² berdiam disatu territoir, djadi bukannya ditetapkan oleh pertalian kesanak-saudaraannja) maka anggauta² asli daripada suku itu dapat masih lama terus berkedudukan istimewa, lebih² mengenai hak²nja atas tanah, hal mana dapat terlihat terang (Kalimantan).

Dilain² tempat, walaupun sedari dulu mungkin seseorang datang berdiam dalam sesuatu dusun dan menggabungkan diri sebagai anggautanja dengan tiada halangan suatu apa terhadap soal kesanak-saudaraan, tapi meskipun demikian kekuasaan-adat dalam dusun dan hak atas tanah² jang dibuka semula, dapat tetap ditangan anak-tjutju (satu sama lain tidak bersanak-saudara) daripada pendiri² dusun jang pertama (dusun² di Bali dan mungkin djuga di Djawa dengan penduduk²-intinja sebagai kelas satu; kelas dua dan kelas tiga).

Achirnja: ada djuga dusun² dan gabungan²-wilajah jang tak bertjorak susunan kekerabatan sedikitpun dan tak mendahulukan kedudukan anak²-tjutju pendiri² dusun itu, dan dimana pemilik rumah-halaman beserta sedikit tanah-pertanian sudah begitu sadja termasuk penduduk kelas satu, atau dimana pembagian kelas² sama sekali tidak ada.

Bagaimana territorial-pun djuga dasarnya masyarakat²-dusun tersebut tadi, namun sebagaimana telah diuraikan (halaman 17) umat manusia jang mendiami dusun itu merupakan satu gerombolan (di Bali disebut *désa*, di Djawa: *wong akèh*) jang sebagai kesatuan (bukan mengenai bentuknja) sama sekali dapat dipersamakan dengan *isi ni huta*, jaitu orang² dusun seluruhnja di Batak dan dengan *laman dusun* di Pasemah.

Pembagian anggauta² dalam kelas² itu terdapat di masyarakat²-hukum dalam banjak lingkungan²-hukum; namun patokannja meng-(k)elas ini adalah berbeda². Tadi sudah disinggung „mempunyai tanah” sebagai patokan kelas: mempunyai tanah-pertanian beserta halaman, kadang² mempunyai tanah-pertanian tertentu beserta halaman, demikian itu sudah mendjadikan pemiliknja „kelas satu”; hak

logis, dipakai perkataan „suku” (stam) dan „kerabat” (geslacht) buat bagian²-nja. Disamping itu perkataan „suku” (stam) dapat dipakai buat: suatu gabungan clan² jang hidup menjendiri. Perkataan „kerabat” (familie) bermaksud susunan kerabat segi-satu atau segi-dua terdiri dari sanak-saudara jang dapat dikenal kembali sebagai kesatuan. „Kerabat” itu dapat bermaksud sama dengan „bagian-clan” atau „suku” atau bagian ketjil daripada kedua²-nja itu, tapi senantiasa lebih besar daripada „keluarga²” (gezinnen).

kelas dua : jang tak mempunjai tanah selandjutnja tergolong kelas tiga. Rangka ini mengandung kemungkinan peralihan² dan tjorak-ragam jang beraneka-warna : k e l a s - p e m i l i k ² - t a n a h atas halaman sadja atau hak atas tanah bukannya tanah²-inti : adalah suatu tanda-chas buat Djawa dan Bali. Kedudukan pemilik² tanah, jaitu anggauta² dari ummat-manusia jang pada asalnja genealogis susunannja, berdiam disuatu masjarakat jang sudah menjadi territorial (misalnja orang² paung asal didusun² tjampuran disungai Barito di Kalimantan) rupa²-nja berdasarkan atas pokok-pikiran tersebut diatas djuga. Hal sedemikian itu djuga terdapat terhadap kerabat² pembuka tanah pertama di Minangkabau jang berderadja diatasnja golongan² kerabat jang datangnya di-nagari diwaktu belakagnja, sedangkan rupa²-nja hal ini ada hubungannya dengan kedudukan sesuatu marga jang „meradja” (heersende marga) ditanah Batak.

Dibanjak daerah di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Timor timbullah dimasjarakat² lingkungan rakjat suatu k e l a s p e n g - h u l u (hoofdenstand) — kelas „bangsawan” dan kelas² di-alam radja² tak dibitjarakan disini — jang dipertahankan dengan djalan : hukum-waris Indonesia jang mengandung perketjualian buat kelasnja, pelarangan atas perkawinan pemudi² penghulu dengan lelaki² dari kelas jang dibawahnja, pengambilan sebagai bini muda dari wanita² kelas bawahan oleh anak² laki² bangsa penghulu, dan wanita sesama kelas dijadikan bini tua (hoofdvrouw). Djumlah wang djudjur atau djumlah wang kemantin adalah, dimana aturan itu ada, buat pemudi² dari kelas penghulu lebih tinggi dari pada buat anak² perempuan orang kebanyakan, malahan mereka ini dilarang meminta wang djudjur jang ketinggian. Delikt² (pelanggaran² dan kedjahatan²) jang diperbuat orang lawan penghulu² dihukum menurut adat lebih berat. Penghulu² itu memakai nama² dan gelar² jang tak mungkin ditjapai oleh orang ketjil. Pada upa-tjara² adat maka penghulu² mendapat hak² mendahului, berupa : urutan² duduknja, matjam perkakas tempat hidangannja jang di-edarkan, matjam bagian daging chewan tersembelih jang dipersembahkannya, pula mereka didahulukan dan dihormati. Tjaranja penghulu² diperbolehkan berpakaian adalah lain dari pada tjaranja rak-jat djelata, tjara pemakamnja-pun lain dari pada orang ketjil, dan jang terachir ini terlarang memakai tjara itu. Karena tjara² adat sedemikian itu maka perbedaan kelas tetap suatu perbedaan sosial jang dirasakan sehari² dan banjak aturan²-hukum bertalian dengan itu.

Diwilajah² jang ber-endogamie dusun atau suku, penghulu²-pun mentjari bini dilain² tempat untuk menegakkan kelasnja (endogamie-kelas = stand-endogamie).

Kelas-penghulu suku Abung di Lampung, ialah *penjimbang*, sudah mendjadi aturan jang setengah terpendam karena pangkat dan gelar jang lebih tinggi (*pepadon*) dapat dibeli oleh umum, walaupun dilain² tempat penghulu² itu dapat menaikkan deradjatnja dengan djalan membayar setjara adat kepada lain² penghulu.

Terhadap Sulawesi Selatan asalnja perbedaan kelas itu dikira orang karena susunan clan dahulu kala. Rupa²-nja asas² klassifikatie primitief djuga turut mengakibatkan pembentukan golongan² dan pembagian² mendjadi kelas².

Patokan umum daripada adanja kelas sedari dahulu kala ialah penghambaan dan ketaklukan (dari pihak orang² jang telah dikalahkan, orang² jang berhutang dan anak-tjutjunja). Kelas budak (*slave n stand*) jang sekarang sudah lenjap, namun masih dapat dikenal di banjak masjarakat², antara lain dari tjara²nya berkawin, djumlahnja wang djudjur, diperlakunja bagaimana dipista² adat; djuga soal bahwa seseorang berasal dari lain tempat ada pengaruhnja atas hubungan²-hukum, misalnja mengenai tanah. Begitupun ada suku² bangsa dipulau² tersebut dimana tak terdapat kelas-penghulu (misalnja suku Toradja jang berbahasa „barèe” begitupun djuga ada suku² bangsa jang tak pernah mengenal kelas taklukan dan kelas budak; namun tiga-serangkai: kelas-penghulu — orang ketjil atau kelas-merdeka (tergantung dari kebalikannja) — kelas-budak, terdapat berulang². Terkadang² didaerah² lingkungan radja² sedikit-banjak ada hubungannja, malahan ada pertjampuran, antara bangsawan-radja-bawahan dan penghulu²-masjarakat, namun disana perbedaan antra kelas-penghulu dalam masjarakat² dan bangsawan-radja diluarnja kebanyakan masih dapat dikenal kembali.

Di Minahasa, di Ambon dan di Uliaser masjarakat rupa²-nja tidak (tidak lagi) mengenal perbedaan dalam kelas dengan kedudukannja hukum masing², dilain pihak maka pembagian dalam kelas² ini di banjak pulau di Maluku mengakibatkan bentuknja golongan² jang satu sama lain terpisah dengan tegasnja dengan nama²-nja sendiri dan endogamie-nja jang tertib (*mèlmèl*, *rènrèn* dan *iriri* di Kei, dan *marna*, *wuhru* dan *atan* di Kisar dan sebagainja); perkawinan dengan tak sesama kelas (*mésalliance*) buat si-perempuan — (dulu) — diantjam dengan hukuman mati atau pembuangan.

Masjarakat² itu dengan susunannja genealogis-territorial beserta pemerintahnja collegial atau hanja ditangan satu orang (hal mana djarang) dan pembagiannja dalam kelas², biasanja dapat djuga dimasuki orang² luaran. Memasuki masjarakat² oleh orang² Indonesia dari luar, orang² sesama suku atau orang²

luaran, adalah suatu proses jang telah berabad² berlangsung. Pertama kali mereka datang sebagai budak dan dengan demikian memang membawa darah baru dan menduduki tempat ekonomis jang amat penting, namun sebagai budak mereka tak dapat memasuki inti susunan masjarakat. Selandjutnja ada jang datang sebagai sanak-saudara ipar, terdiri dari perempuan² atau lelaki². Perkawinan² ambil-anak (inlijf-huwelijken) di beberapa wilajah djustru diselenggarakan dengan lelaki² dari lain tempat (mereka dari perbudakan dan perkawinan tadi, orang² luaran setjara perseorangan dapat pula memasuki masjarakat itu. Dimasjarakat² jang terdiri dari golongan² genealogis, dengan djalan „dipungut sebagai anak” (adoptie) atau dengan djalan menggabungkan diri dalam sesuatu keluarga, hal mana dalam hukum-adat sudah ada aturannja (di Minangkabau sebagai *anak semang* pada *induk semang-nja*) dalam pada itu disadjikan selamatan makan kepada penghulu² dusun dalam rumah madjikkannja. Djuga masjarakat² territorial, sebagaimana sudah diuraikan, tetap menolak masuknja orang² luaran kedalam gerombolan manusia itu. Orang jang hanya tinggal didaerah masjarakat, dapat menjadi penduduk sementara atau tetap — namun terhadap masjarakat sama dengan orang luaran jang bertempat tinggal diluar masjarakat; ia dikenakan pemerintahan atasan (dari radja atau gubernemen) jang djuga melingkupi masjarakat itu; ia dapat dengan djalan perdjandjian memperoleh hak menikmati (genot) atas tanah masjarakat (hal. 63); penghulu² rakjat dapat menanggung keselamatannja terhadap masjarakat asalnja atau jang dikira asalnja, namun kedudukannja tetap berlainan sama sekali dengan kedudukan orang jang sudah dipungut masuk dalam gerombolan orang² dalam masjarakat itu dengan aturannja tolong menolong bertimbal balik. Misalnja penduduk² preman Pribumi di Minahasa dan di Ambon berada diluar masjarakat, sebagaimana djuga biasanja *prijaji* di Djawa, jang kadang² bertempat tinggal dan mempunjai tanah dalam desa situ, walaupun tentang hal ini ada perubahannja di Ambon. Untuk dipungut masuk dalam ikatan adat harus ada idin dari pemerintah-masjarakat situ. Kadang² permintaan idin itu harus disertai dengan persembahan-adat, terdiri dari nasi dan seekor ayam atau wang (*wang adat*); djuga sesudah diberi idin untuk menetap itu harus ada selingan beberapa tempo, sebelum ia dimasukkan dalam ikatan adat. Dalam dusun² di Ambon orang sampai lama tetap asing, baru sesudah beberapa turunan maka anak-tjutjunja itu boleh dikatakan

dengan diam² memperoleh kedudukan sebagai sesama anggauta dusun, ketjuali bila agamanya lain (orang² Islam didusun² Kristen), maka mereka buat selama²-nja tak akan dianggap sebagai sesama anggauta. Begitu djuga misalnja tidak mungkin seorang Indonesia tidak beragama Hindu mendjadi anggauta sesuatu dusun di Bali; dan bila ada kedjadian kepindahan dari orang Bali beragama Hindu keagama Kristen, maka jang menimbulkan pertengkaran ialah bahwa orang² Bali-Kristen tadi berkehendak tetap mendjadi anggauta, tapi tetap ditolaknja oleh masjarakatnja. Bila terdjadi seseorang dari luaran sudah terpungut masuk dalam ikatan adat, maka karenanja haruslah ia memiliki penuh beban²-nja dan memperolehlah ia hak² penuh sebagai lain² sesama anggauta. Demikianlah keadaan seluruhnja di Atjeh, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Minahasa dan Ambon tentang ini. Misalnja pemasukan orang² Djawa ke Sumatra Selatan makin lama makin banjak setjara demikian. Pemungutan masuk dapat terdjadi setjara perseorangan atau setjara gerombolan, karena dalam lingkungan²-hukum jang ber-masjarakat²-wilajah kepada orang² asing sesudah membayar *wang adat* diberi idin untuk mendirikan dusun. Karena anggauta²-masjarakat sendiri terbagi² mendjadi pelbagai golongan atau kelas dengan berbeda² haknja, maka kedudukan orang baru itu tergantung dari djawab pertanyaan: kira² ia dulu termasuk golongan apa; ini belum ada keputusan apa² diwaktu ia dipungut masuk ikatan adat itu. Apakah ia dapat dipilih mendjadi penghulu, atau apakah ia dapat memperoleh „hak-milik” atas tanah dengan keharusan memikul beban²-nja, apakah dia turut mendapat bagiannja dari hasil² „beschikkingsrecht”, malah apakah dia termasuk golongan jang berhak diundang, maka hal² ini kesemuanja tergantung dari persetudjuan² dibelakang.

Tentang djatuh ke-susunan-rakjat concreet jang mana daja faktor² genealogis dan territorial, perbedaan kelas dan pemasukan orang² asing, nanti pada achirnja, maka hal ini tergantung dari banjak keadaan². Disatu fihak tergantung dari perdjalaran nasibnja masjarakat sendiri sebelum, diwaktu dan sesudah lahirnja, pula dari reaksinja terhadap dan penolakannja melawan pengaruh² dari luar. Faktor besar jang mendorong keperubahan bentuk ialah pengembaraan keluar, jang disebabkan oleh pelbagai alasan (keinginan untuk berdiri sendiri, kekurangan hasil² hutan atau gainja). Keadaan² jang didjumpai oleh gerombolan jang mengembara keluar itu, ialah: daerah tak bertuan atau daerah jang sudah diduduki orang; masjarakat² ummat manusia jang bersikap musuh.

atau sahabat ; lembah² sungai, pulau² atau tanah datar, ini kesemuanya dapat mendjadikan salah satu faktor jang berpengaruh atas bentuknja masjarakat itu. Dilain pihak untuk itu pada umumnja adalah djuga suatu faktor jang menentukan, ialah susunan dari induk-masjarakat pada saat pengembaraan. Pergaulan dengan orang² asing jang makin lama makin ramai dan oleh karenanja perubahan² daripada kebutuhan² ekonomis dan daripada tjara berfikir tentang peribadatan, kesemuanya itu tetap menjebabkan perkisaran, walaupun perlahan² tapi selalu.

Pengembaraan besar²-an mengakibatkan kolonisasi, ialah pembentukan masjarakat² orang² luaran pada awal-mulanya, ditengah² rakjat jang sedjak purbakala berdiam disesuatu wilayah (jang djuga disebut penduduk asli). Orang² kolonis tadi hidup dalam masjarakat² dan dalam pada itu dilingkungan rakjat dapat dikenal sebagai golongan² jang tersendiri. Pekerdja² Djawa daripada perkebunan² jang besar² hampir selalu bertempat tinggal berkumpul dalam kampung² sendiri, sebagaimana orang² Djawa jang berbojong setjara besar²-an dan dengan bantuan pemerintah ke Sumatra Selatan (Gedongtataan dan sebagainya). Namun djuga tanpa pertjampuran tangan pemerintah orang² Indonesia berpindah dalam rombongan² besar kelain² tempat. Koloni² Minangkabau dipantai Barat Atjeh, Koloni Toba sedjumlah 15000 djiwa di Tapanuli Selatan (Sajurmatinggi), orang² Bugis di Bali dan Lombok, orang² Bandjar di Indragiri dan sebagainya. Mereka datang menetap dalam susunannya sendiri dengan penghulunja sendiri (tapi jang sudah dirobah karena pengembaraannya jang djauh) dalam daerah tak bertuan atau mendesak lambat laun penduduknja asli keluar, atau djuga mereka sebagai orang² asing mengakui kekuasaan dan hak daripada penduduk jang mendahulu, jang tanahnya tetap mereka diami sebagai masjarakat² berdiri sendiri, misalnja : orang² Minangkabau (orang² *pengulu*) ditengah² suku *Batin* di Djambi ; orang² kolonis Toba dan Karo ditanah Dairi, orang² Dajak-Maänjan-Siung merupakan golongan-*Bantai* dalam masjarakat Dajak-Lawangan, dan seterusnya. Proses perobahan dalam ketertiban dusun itu kadang² mendapat dorongan berwudjud pertjampurannya tangan daripada kekuasaan² pihak luaran atau pihak Pribumi, jang melarang bertempat tinggal dipegunungan², jang mengadakan bagian² territorial, jang memberikan tanah² „lungguh“, jang menarik beaja² dan menuntut kerdja rodi, jang membela kepentingan setjara melampaui batas pengertian masjarakat, jang menempatkan pegawai² disamping dan diatas penghulu²-rakjat dan jang mentjoba memberikan kepada penghulu²-rakjat suatu kekuasaan, jabatan jang tak sesuai dengan imbanan² adat.

Orang harus amat berhati² dengan gambaran² tentang perkembangan dan pertumbuhan masyarakat², gambaran² mana yang berpangkal djauh dizaman lampau ; gambaran² sedemikian itu seharusnya ditunda dulu sampai kita akan mengetahui sekedar dari zaman kultur yang lampau dari keadaan dan tudjuan kulturenya bangsa² yang beribu² tahun yang lampau memasuki kepulauan Indonesia ini.

Sebagai dasar pengalas untuk apa yang dalam buku ini akan diuraikan tentang hukum-tanah dan hukum-perhutangan (*gronden en schuldenrecht*), pula untuk penetapan dan penegasan daripada apa yang tadi telah disinggung dalam garis besarnya mengenai susunan rakjat, maka berikutnja akan ditindjau lebih djauh kesatuan² susunan rakjat di beberapa lingkungan-hukum dan anak-lingkungan-hukum di kepulauan Indonesia ini dalam garis² besarnya — dalam pada itu akan selalu dipakai sebutan² „masyarakat” (*de gemeenschap*), „kerabat” (= *de familie*), „clan”, suku (*de stam*) kerabat atau kaum (*het geslacht*) dan „penghulu²-rakjat” (= *de volkschoofden*) — susunan²-rakjat yang meskipun ada penjimpangan²-nja dan bentuk²-nja istimewa dari kehidupan praktis, namun masih dapat dikenalnya kembali ; dalam pada itu akan sekedar dapat ternjata djuga bagaimana beraneka-warnanya dan pendjelmaannya masyarakat² dalam beberapa lingkungan-hukum.

Urutan membahasnja diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat² dimana faktor genealogisnja berlaku terkuat, didahulukan, dan dimana semata² faktor teritorial berlaku, diperbelakangkan, Timur Besar adalah dianak-tirikan dalam hal ini, karena sebab² yang tersebut dalam antar kata.

B. Bentuk² khusus.

I. Menurut patokan yang sudah kita tetapkan buat urutnja, maka harus didahulukan pembicaraan mengenai masyarakat GAJO. Bagian-clan yang tersusun atas hukum-bapa dan exogaam ini adalah masyarakat-hukum (*rechtsgemeenschap*) ; rakjatnja berdiam tersebar dalam kelompok² yang terdiri dari keluarga², yang kadang² sendiri, tapi kebanyakan bersama kelompok² keluarga dari lain bagian-clan (*kampong*) mereka bersama² mewujudkan suatu dusun, tempat kediaman bersama. Disitu tak ada kekuasaan, selainnja kekuasaan kepala-bagian-clan (*reudjeu*) atas anggauta²-nja (*saudeureu*), tidak ada pertalian selainnja pertalian sesama anggauta satu sama lain. Mengenai Gajo Luëus pernah ada terbatja bahwa bagian-clan dibawah *reudjeu*-nja dulu mempunyai lingkungan²-pengaruh teritorial yang lebih luas dari pada luasnja tanah² yang sudah dibuka oleh *saudeureu*-nja. Oleh kekuasaan di Atjeh maka dulu diangkat kepala² untuk mengepalai daerah², dengan sebutan *kedjuron* (*keudjuën*) ; maka karena kekuasaan Belanda *kedjuron* itu — setidaknya-

nja *kedjuron* petiambang di Gajo Luës dengan dewan *reudjeu tjèq* berasal dari daerah atau *landschap*nja — sekedar kekuasaan jang njata, sedang masing² *reudjeu* diberi bagian suatu distrik sebagai daerah kekuasaannja, dalam daerah mana dia oleh kelompok² keluarga dari golongan bagian-clan lain jang berdiam disitu diakui sebagai kepala-distrik dan rupa²nja lambat laun djuga sebagai kepala (penghulu) adat.

Reudjeu (tjèq) dalam pemerintahan adat dibantu oleh *petuë* buat urusan² keduniawian dan oleh *imeum* buat urusan² agama ; di Gajo Luës ia membawahkan kepala² daripada bagian² kaumnja, ialah *reudjeu mudeu* dengan *imeum*-nja dan *wakël*-nja sendiri. Dengan tertib diadakan permusjawaratan dengan sesama anggautanja. Suku-bangsa kedua jang tersusun serupa itu adalah orang² PUBIAN di Lampong.

Ketiga clan (*merga* ; dilain tempat² di Sumatra-Selatan „merga” berarti masjarakat daerah, *streekgemeenschap*) berdiam bertjampuran didalam daerah jang diduduki suku-bangsa Pubian. Mereka terbagi² mendjadi bagian²-clan (*kabuaian*) jang dapat terbagi² pula mendjadi kerabat² besar (*suku*). Dalam sebuah dusun (*tiuh*) mungkin ada berdiam suku dari pelbagai *merga*, malahan djuga bagian² daripada *suku* jang tjenderong akan merdeka berdiri sendiri. Penghulu² (kepala²) jang sesungguhnya (lebih tepat : „ketua”) adalah penghulu²-*suku* (*panjimbang*) ; *kabuaian* dibawahkan oleh *paksi*, sekali tempoh oleh *panjimbang*² bersama². Djadi *paksi* itu mempunyai kekuasaan, tidak tergantung dari tempat dimana sesama anggauta *kebuaian*-nja berdiam. Karena pengaruh dari Banten maka daerah Pubian itu telah terbagi mendjadi bagian² territorial, jang diakui oleh kekuasaan Belanda sesudah tahun 1928 dan jang sekarang mendjadi masjarakat²-wilajah (*streekgemeenschappen*) ; pada awal mulanja dulu maka *paksi*² bersama didaerah serupa itu mempunyai kekuasaan atas urusan² jang tertentu ; kini masing² masjarakat-wilajah (disebut *marga* pula) mempunyai kepala-*marga*. Djuga disini per-territorial-an karena pengaruh dari atas, tapi dibawahnja masih kentara susunannja sendiri jang asli. *Suku* itu masih bertindak sebagai masjarakat²-hukum genealogis. Pertalian sebagai masjarakat-hukum dengan kerabat²-nja jang tersiar dilebih dari satu masjarakat-wilajah, mendjadi lenjap, begitu djuga pertaliannja dengan kekuasaan penghulu² dalam arti genealogis atas anggauta²-nja jang berdiam ditempat² lain. Seperti didaerah Pubian ini dengan clan²-nja jeng berdiam bertjampuran di Lampong, maka di Padanglawas ada terletak suatu daerah ialah Tano sapandjang, dimana empat clan Batak setjara demikian berdiam bertjampuran satu sama lain ; dan rupa²-nja keadaan sedemikian itu terdapat djuga misalnja dipulau Roti. Daerah² serupa itu (dalam tingkatan be-

sar dan tanpa masjarakat-hukum jang melingkupinja) adalah seperti bagian²-clan jang berdiam bertjampuran satu sama lain dalam suatu nagari.

Selanjutnja susunan² rakjat Gajo, begitu djuga Pubian dapat dibandingkan dengan susunan rakjat ALAS jang sukubangsa²-nja (stammen, *merga*) dan suku²-nja (geslachten) terubah-bentuknja oleh kekuasaan dari luar sehingga mendjadi masjarakat²-territorial (djuga disebut *merga*); didalamnja ada tempat² berumah halaman (djuga disebut *merga*); dibawah kekuasaan seorang kepala jang dijadi satu (*kampung*) dibawah kekuasaan seorang kepala jang disebut *pengulu suku*. Sedemikian rupa djuga dipulau SIMEULUE, dimana disusunan rakjatnja terdapat persamaan jang luar biasa dengan Pubian. Djuga disana bagian²-clan ber-hukum-bapa jang disebut suku, berdiam bertjampur dalam suatu „landschap”, suatu masjarakat-wilajah (*streekgemeenschap*) jang diurus oleh penghulu² suku bersama dibawah pimpinan seorang dari mereka, ialah *datuq pamuntjaq*.

Segumpal daripada bagian-clan jang berdiam dalam suatu kampung dipimpin oleh seorang kepala kerabat jang ditundjuk oleh *datuq*, dan kepentingan² kampung seluruhnja diurus oleh kepala² itu bersama. Disana sini faktor territorial ada peranannja akan tetapi sangat sedikit artinja. Demikian djuga dikalangan rakjat penduduk kepulauan LINGGA-RIAU, jang berdiam tersiar dibanjak pulau ketjil² terutama dalam pertaliannja genealogis dibawah pengurusan kepala² (penghulu²) bagian²-clan — sering disebut *suku* — sedang gerombolan² genealogis itu tak menduduki daerah teritorialnja sendiri.

2. Bentuk suatu bagian-clan didaerahnja sendiri rupa²-nja terdapat dibagian² pedalaman dibanjak pulau² ketjil² (ENGGANO, BURU, SERAM, FLORES). Dipantai² timbullah dusun² tjampuran, terdiri dari kerabat² pelbagai clan jang mengembara dari pedalaman, pula dari orang² asing jang datang dari seberang laut. Di IRIAN, ialah didaerah pedalamanja jang dikundjungi orang buat pertama kali, terdapat suatu clan didaerahnja sendiri (clan-kanguru: Kauwerawet (clan babi dan seterusnya). Dalam kepindahannja kepantai itu maka gerombolan²-genealogis ketjil² itu (*kêrêt*) mempertahankan kemerdekaannja sendiri², mereka disana menduduki tanah semata² buat mereka sendiri, walaupun mereka berdiam bersama² kerabat² dari clan² lain dalam dusun² jang diperintah oleh seorang kepala-dusun, *korano*, tapi jang hanja mempunjai sedikit kekuasaan atas orang² jang bukan anggota clannja.

3. Bentuk terdiri dari bagian²-clan jang bukan karib satu sama lain tapi bersama² mewudjudkan suatu masjarakat territorial adalah terutama terdapat di MINANGKABAU. Sesama anggota clan ber-hukum-ibu jang tidak berdiam di nagari jang sama, tidak me-

wujudkan masjarakat-hukum, tidak mempunyai pemerintahan bersama, tidak berkekajaan bersama. Masjarakat²-hukumnja adalah : pertama² kerabat (bagian-clan) dalam dusun ; kerabat² itu adalah setengah sesama clan dan setengahnja lagi tergolong pelbagai clan ; kerabat² sesama clan menjadi merdeka berdiri sendiri sesudah memetjah belah diri ; selandjutnja kadang² (tidak dimana² tempat) gabungan² daripada kerabat² sematjam itu jang setengahnja bukanja golongan clan² jang bersanak-saudara ; ketiga : *negari* jang terbentuk dari bagian² clan, jaitu kerabat² jang terhimpun atau tak terhimpun dalam gabungan. Clan² Minangkabau itu mempunyai nama² sendiri, sebagaimana djuga clan² Gajo, Pubian dan banjak clan² lainnja lagi.

Tidak ada suatu lukisan mengenai Minangkabau jang tak memulai dengan peringatan : dijangkan menjamaratakan ; disini peringatan itu lebih tepatnja daripada dilain tempat, sehingga disini hanya garis² pokok² sadja jang digoreskan. Bilamana orang dalam angan² mentjoba menggambarkan dengan djalan mentjipta pertumbuhanja dari bawah, maka haruslah orang memulai dengan mentjiptakan sebagai bahan : beberapa clan, umpama 24 ; pada saat jang tertentu maka datang berdiam perempuan² dari pelbagai clan (dengan saudara²-nja lelaki dan suami²-nja) baik didaerah tak bertuan, maupun ditanah jang belum terbuka, dalam lingkungan „beschikkingsrecht” suatu *nagari*. Lambat laun bertumbuhlah dalam tempat kediaman situ kerabat² itu, demikian djuga bertumbuhlah tempat kediaman itu sendiri.

Pertama golongan²-sanak-saudara : perempuan² itu, jang dapat dipandang sebagai nenek²-mojang tempat kediaman, menurunkan kerabat² dan bagian²-clan jang berpusat pada milik-kerabat (tanah², rumah, barang² berharga, gelar-kerabat daripada kepala-kerabat). Sebuah kerabat (*sa buah paruiq*) hendaknja digambarkan dalam pikiran sebagai rumah-kerabat sendiri, dengan lelaki jang tertua daripada keturunan jang tertua pula sebagai kepala-kerabatnja. Bilamana kerabat itu menjadi kebesaran, maka didirikan sebuah rumah-kerabat baru, dimana sebagian kerabat berpindah untuk bertempat tinggal, sementara masih merupakan satu masjarakat dengan bagian²-kerabat lainnja ; dengan djalan demikian (dibelakang terutama meluas kerumah²-keluarga) meluaslah kerabat itu meliputi *nagari* (atau mereka berpindah kelain² tempat dan tiba diluar masjarakat). Kepala daripada segenap kerabat tetap adalah lelaki tertua daripada keturunan jang tertua, ketjuali bila ia dikesampingkan karena tidak tjakapnja. Dalam kedudukannja itu ia ikut serta dalam pemerintahan dusun dan disebutnja *pengulu andiko* ; hanya bilamana kerabatnja sudah menjadi kebesaran atau bila orang² baru dalam kerabat itu membentuk gerombolan baru jang ingin berdiri

sendiri, maka dapat terdjadi pemisahan, dan kedua bagian itu masing² dibawahkan oleh *penghulu andiko*-nja sendiri. Dalam kerabat serupa itu kadang² terdapat banjak atau sedikit atau sama sekali tiada tjabangnja, jang sedikit banjak merupakan masjarakat berdiri sendiri mengerumuni barang² warisan bersama berasal dari perempuan atau lelaki jang meninggalkannja sebagai barang² hasil usahanya sendiri semasa hidupnya, pula mereka mengerumuni bagian² barang² pusaka kerabat jang diserahkan kepada mereka untuk dipakainya (hal. 199). Tjabang²-kerabat itu kerap kali (tapi tidak dimana² tempat begitu) ada dibawah pimpinan ketua²-nja sendiri, ialah *mamak kepala waris* atau *tungganai*. *Pengulu andiko* itu merangkap *mamak kepala waris* tjabangnja sendiri; dimana tjabang²-kerabat tak mempunyai *mamak kepala waris* sendiri, maka *pengulu andiko*-lah di masing² tjabang memangku kedudukan itu. Bila ada orang² baru — orang² Minangkabau — mendatang dalam nagari, maka walaupun sebelumnya itu harus dipungut masuk lebih dulu dalam sebuah kerabat jang telah berdiam disitu, mereka dibelakang kebanyakan membentuk masjarakat tersendiri, dilandjutkan oleh perempuan² daripada golongannya itu. Lamanja masa berdiam sesuatu kerabat dalam suatu *nagari* tetap membawa pengaruh atas kedudukannya kemasjarakatan, makin lama makin terkemuka. Orang² asing, ialah orang² Indonesia bukan Minangkabau (jaitu orang² Nias) dibiarkan dalam kedudukan tak-bebas; apa jang disebut golongan² budak, ialah *kemenakan dibawah lutuiq* adalah dibawah perintah sebuah kerabat Minangkabau. Selagi bertumbuh golongan²-kerabat itu, maka bertumbuh terus pula kampongnya, ialah *tratraq* mendjadi *dusun* dan *dusun* mendjadi *kota*, itupun karena didirikanja disitu rumah² jang kokoh kuat, dan *kota* mendjadi *nagari*, itupun karena telah didirikan rumah-dewan sendiri (*balai*), tempat mandi (*tapien*), tempat penjabung ayam djantan (*galènggang*) dan sebuah rumah-sembahjang sendiri, kesemuanya menandakan terang, bahwa golongan² manusia disitu sudah menetap dengan kokohnya dan bahwa manusia dan tanah sudah bertumbuh mendjadi satu sebagai suatu kesatuan berdiri sendiri dengan njata. Bilamana lembaga² itu ada semua dan bilamana berdiam paling sedikit empat golongan² jang bukan se-clan didusun situ (*nagari baämpèq suku*), *suku*² mana mempunyai daerah „beschikingsrecht” sendiri terpisah satu sama lain, maka dusun itu diakui sebagai *nagari*, dengan pemerintahan sendiri dan dengan pemisahan dan pembatasannya daerah „beschikingsrecht” umum milik nagari itu, pengakuan mana dilangsungkan dengan upatjara² adat.

Susunan dan pemerintahan dalam nagari selandjutnja memetjah mendjadi dua tokoh, jang keduanya terbelah dan terikat oleh sejumlah banjak bentuk²-peralihan. Menurut *adat-Bodi-Tjaniago* jang berlaku terutama di Agam maka *pengulu² andiko* (kepala²

kerabat) bersama² dan atas persamaan kedudukan memegang pemerintahan dalam suatu *nagari*. *Kerapatan nagari* itu adalah kekuasaan jang tertinggi. Bagian-clan dalam arti sedjumlah kerabat² jang tergolong satu clan tapi berdiri sendiri berdampingan satu sama lain, disana disebut *suku*. Pemetjahan kerabat mendjadi dua bagian terdapat kerap kali. Sebaliknya bagian²-clan (disini disebut *kanpuang*) terdiri dari kerabat² jang berdiri sendiri, di Tanah Datar dan Limapuluhkota menurut *adat-Kota-Piliang* terhimpun dalam gabungan² meliputi 4, 5, 6, dan 9 bagian²-clan termasuk golongan sekian clan pula jang terdiri dari kerabat berdiri sendiri, atau tidak; gabungan² itu disana disebut *suku* misalnja *suku „nan ampèq“* dan sebagainya, namun kadang² mempunjai djuga nama-clan daripada clan-nja kepala-*suku*. Dalam kebanyakan *nagari* maka dari kebanyakan clan² itu ada anggauta²-nja disitu; mereka djauh dari pada selalu terhimpun setjara sama seperti gabungan empat, lima, enam dan gabungan²-sembilan tersebut tadi. *Pengulu andiko* dari pada suatu *suku* memerintah atas *suku* itu dan dia sendiri dipimpin oleh seorang *pengulu suku*; empat *pengulu suku* itu dibawah pimpinan seorang kepala-dusun (*putjuq nagari*) memerintah atas *negari* itu, dengan *pengulu andiko* tadi. Kepala²-*suku* disampingi oleh *manti* buat urusan pemerintahan umum, oleh *dubalang* buat urusan polisi dan oleh *malim*, buat urusan agama; mereka dengan *pengulu* merupakan *urang ampèq djinih*. Pengangkatan dan pemberhentian *pengulu andiko* dalam hukum-adat diatur dengan pandjang lebar.

Susunan Minangkabau jaitu: gerombolan² genealogis jang sedari dulu bersama² mewujudkan suatu masjarakat, maka pertama² susunan itu tjotjok dengan susunan di KRINTJI. Djuga disana adalah golongan²-sanak-saudara berhukum-ibu (*lurah, kelebu, perut*) jang karib atau tidak satu sama lain, bersama² merupakan *dusun* diliputi oleh masjarakat-wilajah *mendapo*. Serupa itu djuga diberikan orang terdapat dikalangan suku BATIN di Djambi. Masjarakat²-wilajah territorial (atau gabungan²-dusun) dipulau NIAS termasuk tokoh sedemikian rupa djuga; disana bagian² daripada pelbagai clan, *mado* atau *gana*, baik menetap disatu tempat, baik tinggal terserak disuatu wilajah (disini mirip tokoh pertama, hal. 31-32) berada dibawah kekuasaan pemerintahan-*euri*, jang bersifat pemerintahan-gabungan atau pemerintahan masjarakat-wilajah; dusun² itu terdiri dari bagian²-clan tersusun menurut hukum-bapa dibawah pimpinan kepala²-kerabat, diantara mana seorang mendjabat kepala-dusun. Selandjutnja *negorij* didjazirah HITU (Ambon) adalah terbentuk dari masjarakat²-hukum genealogis (*rumatau*) jang menurut hukum-bapa susunannja, sedangkan misalnja dike-

lauan Kei djuga bagian²clan berhukum-bapa pula jang mewujudkan dusun² disitu. Mereka setengahnja adalah golongan penduduk asli dan setengahnja golongan orang² luaran bangsa Indonesia jang mendatang dibelakang dan berhasil dapat merebut kekuasaan pemerintahan-dusun. Kepala-dusun, *orang kaja* mempunyai hanya sedikit kekuasaan atas kepala² kerabat (*kepala soa*).

4. Sebagai tokoh ke-4 daripada susunan rakjat menjusul sekarang masjarakat²-hukum suku-bangsa BATAK. Djuga dikalangan mereka terdapat golongan² genealogis ialah clan² atau bagian²-clan exogaam dan tersusun menurut hukum-bapa, jang mendiami daerahnja sendiri. Golongan² itu tersusun mendjadi lapisan², jaitu dusun-kerabat, masjarakat-wilajah bagian-clan dan daerah-clan, tetapi dengan tanda-tjiri istimewa seperti tersebut diatas, ialah bahwa dalam sesama masjarakat itu senantiasa atau hampir senantiasa djuga ada berdiam anggauta² daripada clan² lain, walaupun dengan hak² jang kurang, jaitu : salah seorang dari mereka tak dapat mendjabat penghulu-masjarakat, mereka ada hak-milik penuh atas tanah-pertanian dan halaman jang didudukinja, namun kedudukannja sedemikian rupa sehingga mereka harus dianggap sebagai anggauta² masjarakat-hukum itu, dan termasuk *isi ni huta*. Mereka jang mendjadi keluarga semenda terkemuka mewakili golongan²-nja dalam pemerintahan dan kebanyakan dapat mendirikan dusun sendiri dalam masjarakat-wilajah (walaupun kedudukan dusun² itu seluruhnja adalah tetap : tempat buat penduduk-penumpang sadja), namun mereka karena lamanja berdiam bersama² mempunyai kedudukan jang amat kokohnja. Clan² atau bagian²-clan Batak disebut *marga*, dan bagian²-clan jang disesuatu daerah adalah „tuan rumah” kebanyakan (dibagian Selatan tidak) disebut *marga tanah*. Dalam bahasa Belanda disebutnja „heersende” atau „regerende” *marga* (*marga* jang menguasai atau *marga* jang memerintah) berhadapan dengan orang² dari *marga* lain (penduduk-penumpang) jang disebelah Utara disebut *parrippé*. (Disebelah Selatan maksudnja *parrippé* ialah kelas-rakjat, berhadapan dengan kelas-penghulu). Dengan menerobos perhubungan antara *marga-tanah* dan penduduk-penumpang berlainan lain perhubungan jang ada pertaliannja dengan perhubungan tersebut pertama tadi dengan tjara tertentu, jaitu : *marga* jang menjerahkan wanita² terhadap mereka jang menerima wanita². Masing² *marga* mempunyai „langganan” tetap dengan *marga* lainnja, jang mengakibatkan, bahwa dalam principenja pemudi² dari satu *marga* dikawinkan dengan lelaki² dari *marga* jang lain itu. Djadi jang pertama itu adalah *marga* jang menjerahkan wanita² (di Toba disebut *hula-hula*, disebelah Selatan : *mora*, dilain² tempat disebut lain pula), jang kedua ialah *marga* jang menerima wanita², *boru* (*beru*) namanja. Perhubungan ini tidak boleh bertimbal balik, maka

dari itu istilahnja : *asymmetrisch connubium*. Djadi marga jang kedua itu membutuhkan *marga* nomor tiga lagi sebagai *boru-nja* atau *marga* jang menerima wanita²-nja ; *marga* itu sendiri dengan demikian mendjadi *hula-hula-nja marga* nomor tiga tadi. Begitulah dapat digambarkan dalam pikiran suatu lingkaran menangkap daripada tiga marga atau lebih. Maka suatu lembaga jang sering terdapat ialah bahwa *marga-boru-nja marga-tanah* disesuatu daerah, dalam dusun ada perwakilannja sebagai *marga* jang menumpang (pertama) atau „(eerste) *bijwonende marga*”, maka dalam pada itu kadang² disebutnja : *marga-perkawinan* (*trouw-marga*) ; malahan dibagian Selatan misalnja adalah satu sjarat untuk dapat diakui sebagai *huta* jang berdiri sendiri ialah bahwa harus *marga boru-nja radja* sudah ada perwakilannja didusun situ (namanja orang²-nja : *bajo bajo na godang*) (bandingkanlah ini dengan sjarat bahwa *negari* di Minangkabau harus memuat empat *suku*). Karena *hula-hula* itu mempunyai keunggulan-hidup jang tertentu atas *boru-nja*, maka disini letaknja ketaklukkannja jang rangkap daripada *boru* : sebagai *marga* penerima perempuan² dan sebagai *marga* penumpang. Dibeberapa daerah (Padanglawas) maka *hula-hula* daripada *marga-tanah* (*marga* berkuasa) mungkin djuga adalah *marga-penumpang*, maka disini keunggulan-hidup *marga* ini sebagai *hula-hula* tidak merangkap keunggulan-hidup sebagai sesuatu *marga tanah*, akan tetapi disini kekuasaan *hula-hula* toch kalah dengan kekuasaan *boru-nja*, karena marga pertama ini hanya penumpang dan karenanja tergantung pada *boru-nja* jang berkedudukan *marga tanah* itu. Dalam kenyataannja perhubungan² dalam hal ini sangat ruwetnja karena adanya persimpangan² dan perketjualian² jang beraneka warna, tapi orang tahu, bagaimana „sebetulnja” susunan itu menurut mestinja.

Sebaliknya bila membuat lukisan tentang anak-lingkungan-hukum ini, orang berpedoman pokok-pikiran bahwa masyarakat-hukum sebagai kesatuan daripada susunan masyarakat, adalah masyarakat-wilajah (*streekgemeenschap*) (*urung*, *portahian* atau sekarang disebut „*negari*”, *kuria*) dan dusun (*huta*), djadi bukannya bagian-clan-nja ; anak-tjutjunja pembangunan²-*huta* merupakan *marga tanah* (*heersende marga*), garis² pembatasan territoir dusun² dan wilajah² memotong bagian²-clan sebagai masyarakat²-hukum terputus dari bagian² clan-induknja (jaitu tempat asal daripada si-pembuka-dusun itu) ; djadi sesama anggauta clan dari lain tempat tidak termasuk *marga-tanah* dalam sesuatu dusun jang tertentu. Dibagian Selatan dan sebagai sambungannja daerah kedjuruhan Utara ditandjar datar tinggi Toba, Baligé, Laguboti dan Sumban Djulu, disitu adalah hanya satu (tjabang) *marga* jang „meradja” dalam *kuria*, dalam *negari* dan dalam *huta* dengan penduduk-penumpangnja dari *marga* lain disampingnja, didaerahnja ; (tjabang) *marga* itu didaerah² Utara namanja *hordja*, nama mana sesuai dengan pudjaan²

jang disadjikan bersama, djadi : „persekutuan pudjaan“. Dalam beberapa masjarakat² didaerah situ terdapat djuga, bahwa dua atau tiga *marga* berdiam berdampingan satu sama lain atau tjampur baur satu sama lain, ketiga²-nja adalah *marga tanah*, djadi kedudukannja satu terhadap jang lain mirip kerabat² Minangkabau ; bedanja dengan itu terletak dipenduduk-penumpang jang bersama ketiga *marga tanah* tadi djuga termasuk masjarakat itu. Didaerah Pakpak masjarakat-wilajah (atau gabungan dusun²) (*aur*) kebanyakan meliputi *marga* jang karib satu sama lain, jang masing², djuga sebagai *marga tanah* mempunyai daerah sendiri² (bandingkanlah dengan Nias). Disemenandjung Samosir masjarakat²-wilajah jang besar² disebut mula²-nja : *bius* ; disana berdiam bersama pelbagai *marga tanah*, dengan kelompokan-dusun²-nja terpisah satu sama lain letaknja. Tanah² belum terbuka jang termasuk lingkungan-hak-perakuan (beschikkingsrecht) ada dalam keadaan tak terbagi². Sebaliknja di Barus maka disana dimasjarakat-wilajah jang besr (*sembarur*) berdiam beberapa *marga tanah* atas dasar persetudjuan bertjampur baur satu sama lain (bandingkanlah Gajo), mereka mempunyai daerah „beschikkingsrecht“ tak terbagi². Dikalangan orang² Batak-Karo maka kepribadian kampung²-dusun (*kesain*) terhadap masjarakat jang lebih tinggi (*kuta, urung*) sangat kuatnja. Djuga disini dipakai sebutan *marga tanah* untuk *marga* jang „meradja“. Daerah² besar jang berdiri sendiri di Simelungan itu telah mendjadi keradjaan² ketjil² jang lalim ; masjarakat² bawahan disana ada sangat tertekan.

Pemerintahan disemua masjarakat²-wilajah dan didusun² pertama² terletak ditangan seorang wakil dari *marga* jang „meradja“. kadang² dengan dibantu oleh seorang sanak-saudaranja. Selandjutanja dalam pemerintahan itu hampir senantiasa terdapat wakil² dari *marga-boru* dan disebelah Selatan djuga wakil² dari *marga-penumpang* lainnja. Jaitu disebutkan, bahwa disebelah Selatan *kuria* itu diperintah oleh *radja panusunan, kahanggi ni radja* (karibnja, persuruhnja dalam segala matjam pekerdjaan, mungkin bakal penggantinja), *bajo bajo na godang* untuk *marga boru-nja radja* dan *natoras* untuk penduduk-penumpang lainnja. Dalam kenjataanja kepala-*kuria* memerintah bersama kepala²-dusun dan kadang² bersama *bajo bajo na godang*. Ditanah datar tinggi Toba, Baligé dan sebagainja kepalanja disebut *radja pardjolo*, jang memerintah dengan pembantu² dan kaki-tangannja : *radja portahi* ; di Samosir *radja doli* bersama *radja portahi*, jang disana adalah kepala² dari-pada *marga* jang „meradja“ ; di Pakpak pendjabat² pemerintahan, jaitu kepala² *marga tanah*, dinamakan menurut bagian daripada

chewan tersembelih, jang mereka berhak menerimanja diwaktu upatjara² (*parisang isang djuga takal aur*) *parékor ékor* dan *par-tulan tengah*) bersama dengan *beru* untuk *marga-penumpang*. Dju-ga di Barus pemerintahan terdiri dari beberapa kepala. Dikalangan Batak-Karo maka kampong, *kesain*, dan dusun diketuai oleh *pengu-lu* daripada *marga tanah*, dibantu oleh *anak beru senina-nja*, ialah ipar dan saudara dalam arti menurut „abu“-nja (klassifikato-risch) (hal. 127). *Urung* itu diperintah oleh sebuah dewan kepala².

Dapat disamakan dengan susunan rakjat Batak ialah susunan daripada beberapa suku²-bangsa di Timur Besar, dimana djuga ter-dapat „asymmetrisch connubium“.

5. Suatu tjara lain susunan-rakjat daripada jang telah dibitja-rakan sampai sekarang ialah golongan genealogis segi-dua, jaitu suku (stam) atau bagian²-nja : kaum² (geslachten) (kadang² dusun² didiami sesama-anggauta-suku) jang mendiami territoir sendiri.

Terutama masjarakat² tadi terdapat di Kalimantan. Pertama kali disana terdapat DAJAK PUNAN, suatu suku-pengembara jang dalam gerombolan² ketjil² berkeliaran dalam suatu daerah-pengembara ; bila mereka menetap baharulah suku seluruhnja datang berkumpul djadi satu, sebagaimana halnja dengan suku PE-NJABUNG di Barito-udik dalam tahun 1905. Jang paling terkenal sebagai suku² jang sudah mendjadi kesatuan² jang menetap ditem-pat kediamannja sendiri ialah suku DAJAK KENJA di daerah Apo-kajan, suku MAÄNJAN SIUNG dan suku LAWANGAN BE-LOH. Bagian² daripada suku itu, ialah kaum² (kerabat²) memang berdiam mendjadi satu dan memang agak beranti, namun masjara-kat-hukum jang menguasai segala hubungan²-hukum dan perbuatan²-hukum adalah : suku dengan lingkungan-hak-pertuanan (beschik-kingsrecht)-nja sendiri. Pimpinan ada ditangan kepala² (penghulu²) suku dengan segala permufakatan dan kerdja-sama dengan orang² merdeka laki² ; sifat² pribadi kadang² dapat mengakibatkan kekua-saan besar. Dikalangan suku DAJAK LAWANGAN lainnja, pula suku KLEMANTEN di Kota Waringin maka masjarakat² jang terkemuka ialah dusun² jang terdiri dari kerabat² dan jang berdae-rah sendiri, meskipun dalam pada itu masjarakat suku tidak terha-pus karenanja, tapi hanya bergerak dalam urusan² mengenai tanah dan pemerintahan. Tingkatan perkembangan berikutnya terdapat antara lain dikalangan suku NGADJU, OT DANUM dan MA-ÄNJAN PATAI di Kalimantan Selatan ; disana kerabat² itu su-dah meningkat mendjadi masjarakat² jang berdiri sendiri, pertalian-

suku tidak ada artinja. Diwilajah² sini keadaannya sekarang menjadi demikian : makin mendekat pantai maka kerabat itu makin banyak yang diganti dengan dusun. Orang² berasal dari golongan genealogis dulu pada asal mulanya masih juga merupakan kelas yang dilebihkan tentang hak² atas tanah (*paung asal*) — sampai juga ini lenjap menjadi dusun territorial seluruhnya (didaerah pantai) yang merupakan masjarakat-hukum semata². Hanya dikalangan beberapa suku, misalnya LONG GLATT, LEPO TIMEI dan LEPO ALIM (di Apo Kajan) maka suku² yang mengembara itu lalu datang berdiam berserak disesuatu daerah bersama suku² yang terdapat sudah berdiam disitu, maka mereka dibiarkan dalam kedudukan dibawah (hal mana makin menjadi kurang) tapi tidak sampai mereka dijadikan budak.

Djuga Sulawesi Tengah termasuk tokoh ini. Suku TO MORI di Sulawesi Tengah Timur masing² tetap berdiam didaerahnya sendiri dalam masjarakat² genealogis (suku²). Masjarakat²-hukum yang asalnya ialah suku yang berdiam didaerah sukunya sendiri, tapi belakangan lalu memisah² menjadi dusun² daripada sesama anggauta suku, adalah masjarakat²-nya orang² TORADJA yang berbahasa „barèe”, walaupun penghulu² yang berpengaruh masih mempunyai kekuasaan diluar dusunnya atas masjarakat² karibnya dan walaupun perairan ikan rupa²nya dapat dianggap sebagai „miliknya suku”. Dikalangan TORADJA SADAN masjarakat²-wilajahnya disebut *buah* atau *penanian* dikepalai oleh *indo buah* atau *paréngé* dengan kelasnya nomer satu *tomakaka* ialah anak-tjutju pembangun masjarakat itu ; *buah* itu rupa²-nya bukannya dusun²-sesama-anggauta-suku semata², dalam arti kata bahwa orang² luaran dapat dipungut masuk sebagai sesama dalam hak²-nya dalam masjarakat, walaupun teranglah kekuasaan ada ditangan *tomakaka*, kelas mana menghasilkan *paréngé* pula.

Ikatan genealogis menjadi berkurang dan lenjap didusun² dan masjarakat²-wilajah yang akan disebut berikutnya ini. Telah diterangkan tadi, bahwa masjarakat territorial serupa itu dapat terbit dari masjarakat genealogis, yaitu satu kaum kerabat yang berdiam didaerahnya sendiri, maka disitu lambat laun orang² luaran mendapat hak² yang sama dengan anak-tjutju dari kaum yang asli sehingga mereka karena ikut berdiam didaerah itu juga berhak atas bagian-nya dalam masjarakat ; sedangkan mungkin juga bahwa masjarakat² dimana golongan²-genealogis disatu daerah berdiam tjampur baur satu sama lain, disitu karena pertalian kesianak-saudaraan menjadi lemah masjarakatnya lantas menjadi dusun² atau wilajah² territorial penuh ; proses ini terjadi — seperti kadang² di *marga* di Sumatera Selatan dan didusun² pantai di Maluku — dimana golo-

ngan² pengembara dari pelbagai suku sama menetap bersama² satu sama lain dan disini mereka menghapuskan segala pembatasan² satu dengan lain. Tjara timbulnja masjarakat² territorial itu tidak dari-pada semua lingkungan²-hukum (Atjeh, Sulawesi Selatan, Bali, Djawa) dapat diketahui.

6. Suatu misal daripada daerah-suku jang sudah mendjadi ter-ritoir pertama² terdapat rupa²-nja di MINAHASA. Daerah suku (= *walak*) asli beberapa lama (sekarang sudah tidak lagi) hidup terus sebagai distrik (dengan kepala-distrik), dimana berdiam se-mata² sesama anggauta suku; djuga sampai sekarang batas² daerah lama itu masih dihormati oleh pemburu² dan orang² pengumpul hasil hutan. Didalam „distrik” itu, jang induk dusunnja atau tempatnja kediaman pertama masih dapat diketahui, maka oleh beberapa ke-rabat didirikan *negorij*² baru, jang batas²-nja (sesudah empat ta-hun) ditundjuk dan ditetapkan dengan upatjara. Sebagaimana di Minangkabau maka orang dapat menjelidiki asal²-nja dusun² itu sampai kepada dusun pertama, ialah pokok pangkal daripada asal-nja segenap penduduk. Kerabat didalam suku „endogaam” itu tersu-sun menurut hukum-bapa — djadi dimana „bin/binti”-nja, (de „van”) (nama-kerabatnja) berasal dari fihak bapa, dan kerabat itu diketuai oleh kepala-kerabat (*tua un teranak*) tidak sebagai ma-sjarakat-hukum jang tertutup buat orang² luaran, tapi sebagai suatu golongan jang bersama² berhak atas harta peninggalan jang tak ter-bagi². Karena pemetakan distrik² itu, maka lenjaplah pertalian-sa-nak-saudara sebagai faktor dalam susunan masjarakat²-hukum itu dan buat sekarang *negorij* itu harus dianggap sebagai masjarakat-hukum territorial dengan lingkungan-beschikkingsrecht-nja, diurus oleh *hukum tua* jang dibantu oleh *kepala-djaga* dengan *mewèteng* sebagai pembantu²-nja pula.

7. Kedua, maka masjarakat²-wilajah di SUMATERA SELA-TAN, jaitu *marga*, setengahnja dapat dianggap sebagai wilajah² jang didiami oleh sesama anggauta² clan, dimana tergolongnja da-lam golongan-sanak-saudara tak membawa keuntungan hak² jang melebihi lagi, dan setengahnja lagi harus dianggap sebagai suatu pembagian daerah oleh kekuasaan atasan, daerah mana diperkem-bangkan mendjadi masjarakat-wilajah (*streek-gemeenschap*) itu. Dalam *marga* itu terletak *dusun*, jaitu desa² jang sekedar bertegak sendiri.

Dimasa lampau (sampai pertengahan abad ke-19), terdapat disini — sebagaimana sekarang masih terdapat di Kalimantan — djuga segala matjam bentuk: orang² KUBU jang mengembara dalam ge-rombolan² ketjil² didaerah pengembaraannja sendiri; orang² ANAK LAKITAN, jang bergelandangan dari suatu pergabungan

tanah ladang kepergabungan lainnja; orang² REDJANG, suatu clan jang telah menetap didaerahnja sendiri; orang² DJELMA DAJA didaerah KRUE, ialah clan² jang memetjah² sebagai bagian²-clan masing² dengan daerahnja sendiri²; dan orang² PAMINGGIR didaerah SEMANGKA termasuk djenis itu djuga Selandjutnja terdapat didaerah Ranau di Bengkulu dan dilain² tempat bagian²-clan daripada pelbagai clan jang bersama² berdiam dilembah sungai atau diwilajah lainnja, kadang² dengan kedudukan jang lebih unggul buat bagian-clan jang berdiam terlebih dulu disitu. Selandjutnja pula dalam lingkungan luas sekeliling ibu-kota Palembang, dalam daerah „lungguh“-nja (apanage) sultan², ialah di Kapungutan, terdapat pemetakan² dusun-kerabat dibawah kekuasaan pemegang² „lungguh“; batas² menurut pemerintahan; pegawai² diputjuk pimpinan; hanya kerabat²-lah mula² merupakan masjarakat²-hukum; pada achirnja djuga ini lenjap pula. Dipantai antara Palembang dan Banten-di-Lampung, jang tiada kekuasaan untuk mengatur (TULUNG BAWANG) terdapat kekatiujuan besar dikalangan masjarakat² genealogis ketjil² disana (*suku*) jang berdiam bertjampur baur satu sama lain. Penduduk² pantai Bengkulu dan orang² Paminggir sekitar teluk Lampung bersama² unsur² asing merupakan masjarakat²-wilajah tjampuran.

Pada sekarang *marga* itu harus dianggap sebagai masjarakat-wilajah territorial, dimana orang dapat mendjadi anggauta dengan djalan berdiam disitu dan memasukkan diri untuk dipungut oleh ummat jang mendiami masjarakat situ; makin dekat tanah-usul, jaitu kearah daerah pegunungan, makin ada kemungkinan, bahwa masih ada pengaruhnja pertalian sanak-saudara atas penduduk *marga* itu.

Kepala² *marga* dengan gelar *pangéran* atau *depati* disebut *pasi-rah*; kepala²-dusun disebut *proatin*, *kria*, *depati*, *mangku* atau *pembarep*; pembantu²-nja disebut *penggawa*, *pemangku* dan seterusnja; djadi satu dengan kepala² *suku* (*tuo suku*) dan tertua² kerabat lainnja maka kepala²-dusun di Redjang itu disebut *kutai*.

8. Dipulau² ketjil² AMBON dan di ULIASER jang merupakan masjarakat ialah dusun, *negorij*, jang dipantai HITU membawahkan kerabat², *rumatau*, (ialah bagian²-clan) sebagai masjarakat²-hukum (hal. 35, 36), tapi dilain² tempat *negorij* itu hanya meliputi keluarga². Dulu pada asalnja penduduk berdiam dipedalaman sebagai clan² jang tersusun hukum bapa, dan exogaam (*aman*, *héna*) didaerahnja sendiri dan terhimpun djadi satu mendjadi *uli* dalam masa bersedjarah maka bentukan *negorij* dipantai itu dipaksakannja oleh kekuasaan dari luar. Disitu kerabat² (*rumatau*, *soa*) dan kadang² kerabat² jang tak karib satu sama lain, berdiam bersama² dibawah satu pemerintah, jang bersandar pada kekuasaan asing pula.

Di-negorij -Kristen maka sedemikian itu mengakibatkan lenjapnja masjarakat-sanak-saudara ; didalam *negorij* situ hanja *dati*-lah masih tetap sebagai tjabang-kerabat jang tertentu berhukum-bapa, jang memiliki perkebunan², dan jang merupakan „kerabat²-inti“, jang karena tindakan² pemerintah Eropah atau pemerintahan *negorij* kadang² dirobah² bentuknja mendjadi sebarang masjarakat-pemilik-tanah.

Negorij itu dikemudikan oleh kepala- *negorij*, disebut *regent*, dengan dewan *saniri radjapati* namanja. Dalam dewan itu duduk *kepala soa* ; *soa* di- *negorij*²-Kristen sekarang berarti „kampong“ menurut tata-usaha pemerintahan.

9. Suatu masjarakat-wilajah (*wanua* atau *banua*, kadang² se-besar dusun), dimana sangat menjolok mata perwujudan (materialisatie) daripada kesatuan daja-hidupnja masjarakat, adalah persekutuan-perhiasan (ornamentschap), jaitu jajasan- *gaukang* (*gaukang-stichting*) di Sulawesi Selatan ; masjarakat² itu dalam batin satu sama lain terikat oleh perasaan bahwa mereka bersama² mempunyai hubungan dengan suatu benda-pelik jang adjaib, suatu perhiasan, jang disebut *gaukang*, *kalompoan* atau *aradjang*, menurut kata orang pada asal mulanja berwujud : sebutir batu jang ditemukan, seputjuk tjabang berbonggol, seputjuk bendera, seputjuk tombak, sebuah badjak atau lain benda, didalam mana daja-hidup masjarakat berpusat dan jang dianggap perwujudan daripada kesatuannja masjarakat. Benda pelik itu kebanyakan ditambah dengan barang² berharga, jang dibelakang kadang² mengganti *gaukang* jang asli.

Pengembaraan² dari *wanua* asal dapat djuga merupakan masjarakat² jang berdiri sendiri, walaupun mereka tak ada *gaukang* namun kebanyakan lalu disebutnja sebagai bermartabat nomor dua, ialah *anawanua*. Terhadap swapradja² Mandar ada tersebut dalam tulisan bahwa disana bagian²-clan (apakah kesanak-saudaraannja menurut keturunan pihak lelaki?) adalah golongan² jang penting artinja. Tapi masjarakat²-nja dimana² tempat adalah territorial. Pemerintahnja adalah pendjaga (*waardijn*) perhiasan, jang disebut *karaeng*, *aru*, *galarang*, *maradia*, dan seterusnya adalah amat beraneka-warnanja sebutan dan tugas daripada para pembantu dan para kepala² bawahan ; pada asalnja dulu masing² jajasan-*gaukang* ada dewannja, *hadat* ; susunan-rakjat itu sangat dipengaruhi oleh persekutuan²-keradjaan² jang kuat — peperangan — gubernemen ; namun dibawahnja susunan itu tetap hidup terus *wanua* itu sebagai „cel“ dan bentuk-asli daripada keradjaan itu sendiri.

10. Dusun BALI, ialah *désa*, adalah masjarakat territorial sebagian lat²-nja ; pertalian-sanak-saudara di Bali memang betul menghimpun masjarakat²-pemudjaan (jang genealogis dan kurang diketahui

orang)), mendjadi satu, namun anggauta²-nja berdiam bersebaran
dibeberapa dusun dan tugasnja tidak lain dari memelihara kuil dan
bersama² memudja mojangnja jang didewa²-kan ; susunannja kera-
bat² adalah menurut hukum-bapa, ketjuali beberapa dèsa jang ber-
susunan menurut hukum bapa-ibu. Dèsa itu adalah suatu masjarakat
jang pertama² berdasarkan atas kewadajiban dan atas kehendak ber-
sama untuk menjutjikan daerahnja buat dewa²-nja dan untuk me-
nungkinakan penjelenggaraan pudjaan² dan upatjara²-agama lain².
nja sebagaimana mestinja. Adalah perbedaan besar dalam susunan²
diluor dan didalam daerah „lungguh” (apanage-gebied) dulu (jaitu
daerah disebelah Selatan Karangasem, Bulèlèng dan Djembrana di-
kurangi dengan pegunungan² Gianjar dan Bangli), pula perbedaan
besar antara dusun² kolot dan dusun² modern. Dalam dusun² kolot
anggauta² jang diwadjabkan dan berhak pula sebagai anggauta sem-
purna untuk turut senta dalam pekerdjaan pemudjaan, ialah sedjum-
lah tetap atau berganti² (kadang² duapuluh atau kelipatannja dua-
puluh) daripada orang² dusun jang mempunjai tanah²-pertanian
jang tertentu atau mempunjai sekedar bidang tanah-pertanian dan
jang harus sudah berkawin. Terdapatlah aturan² jang sangat ber-
beda² mengenai penggantian bilamana seorang anggauta lowong :
kebanjakan kedudukannja itu dapat diwariskan dalam lingkungan
kerabat, terkadang² djuga tidak. Orang² desa jang tertua menger-
djakan tugas²-pengurus jang istimewa (pasek, dan sebagainja) ar-
tinja, mereka harus mengerdjakan tugas istimewa dipemudjaan de-
wa². Malahan jang memutuskan perselisihan² adalah pada hake-
katnja anggauta² pengurus- dèsa, jang mendjaga djangan sampai
daerah-dusun dinadjiskan karena perselisihan². Anggauta² dèsa itu
disebut dèsa, krama dèsa, kanoman dan sebagainja, namanja saban²
lain. Diantara penduduk²-inti ini maka didalam dèsa kebanyakan
ada segolongan penduduk-dèsa kelas dua, jang masih djuga mem-
punjai bagian tanah dan suatu tugas jang terbatas. Penumpang²
dan orang² baru datang, jang pada mulanja menumpang kepala
krama dèsa merupakan lapisan ketiga (sampingan). Selandjutnja
didusun² terletak diluor daerah „lungguh” radja² dulu, terdapat
pelbagai perkumpulan², jang dibawahkan oleh dèsa. Pertama :
bandjar, jaitu perkumpulan kampong ; lalu perkumpulan² pemuda
dan pemudi, perkumpulan² musik dan sandiwara, dan seterusnya.
Dalam daerah „lungguh” maka masjarakat²-hukum serupa itu ter-
dapat djuga sebagai perkumpulan² jang merdeka terbentuknja, ti-
dak dibawahkan oleh dusun². Dusun² model baru mengidinkan
masing² penduduk lelaki jang sudah kawin masuk mendjadi ang-
gauta perkumpulan-dèsa, mengharuskan mereka masuk anggauta
itu, dan desa² modern itu mempunjai kepala²-dèsa jang disebut

klian, kadang-kadang dengan beberapa orang pengurus lain; dan *klian* itu adalah sebagai gantinya pemerintahan *désa* oleh *anggota*² *dusun* yang tertua. Menurut kebiasaan (ada juga perketjualianja) seseorang menjadi penduduk bilamana ia satu tahun bertempat tinggal di *désa*, mempunyai rumah-halaman dan sudah kawin.

Disamping masyarakat² atau persekutuan² tersebut, maka di Bali yang besar artinya ialah persekutuan²-pengairan yaitu *subak*, yang susunannya pelbagai tjaranja dan hubungannya dengan *désa* pelbagai pula tjaranja; suatu persekutuan diantara pemilik² *sawah* dibawah pimpinan *klian* atau lain pengurus yang bertugas memelihara pengairan. Juga atas *subak* ini radja² dulu besar sekali pengaruhnya di daerah² „lungguh”.

Désa di *Lombok* adalah masyarakat territorial, terdiri dari perseorangan² (keluarga²) yang satu sama lain bukan sanak-saudara. Ia mempunyai lingkungan hak-pertanian (*beschikkingsskring*) dan dikendalikan oleh seorang *kepala désa*.

Juga *désa* di *DJAWA* adalah masyarakat territorial sebulat²-nja dan juga terdiri dari perseorangan² (keluarga²) yang satu sama lain tak ada ikatan sanak-saudara sedikitpun. Tidak termasuk „anggota” *désa*, artinya bukannya sesama-anggota-masyarakat, ialah selainnya penduduk *désa* berbangsa asing, kebanyakan juga *prijaji*, walaupun mereka berdiam di *désa* situ; namun mereka dapat juga masuk kedalam masyarakat-*désa* itu.

*Anggota*²- *désa* (hal. 25) dapat disilah²-kan dalam kelas penduduk-inti (*pribumi, sikep, kuli, baku, gogol*) yang mempunyai tanah-pertanian dan rumah-halaman dan yang memikul beban² penuh: lantas kelas pemilik rumah-halaman atau pemilik² tanah-pertanian sadsja (*lindung, indung, dan sebagainya*) yang memikul hanya beberapa beban, dan akhirnya: kelas pemilik² rumah atas halaman lain orang (*numpang*) atau penumpang² yang mencari nafkah sendiri, (*nusup, tlosor*) dan mereka yang bekerja untuk mereka yang ditumpang; *anggota*² serumah (*anggota*² kerabat), *raja*, tidak merupakan kelas tersendiri.

Di *BANTEN* *désa* itu terdiri dari beberapa *ampian* atau *kampung* agak ketjil²; *kampung*² tadi mempunyai kepala sendiri ialah *kokolot, tua tua*, dan seorang penghubung antara penduduk *ampian* dan kepala *désa* yang disebut *djaro*, yang mempunyai beberapa orang pesuruh.

Di *PRIANGAN* maka *désa* itu terdiri dari *kampung* atau *lumbu* yang letaknya jauh satu sama lain. Kepala²- *kampung* disebut *mandor, punduh*, disini dibawahkan oleh kepala- *désa* (*lurah*). *Lurah* itu dibantu oleh beberapa orang *polisi, ulu-ulu*, dan sebagainya.

Di *DJAWA TENGAH* dan *DJAWA TIMUR* maka *désa* yang sebenarnya itu adalah suatu lingkungan kediaman yang disebut

kradjan dengan *dukuh*²-nja jang dibawahkannja (*padukuan*). Kepala-désa (*kuwu, bekel, lurah, patinggi*) mempunyai kedudukan jang agak autokratik dan mempunyai banjak pembantu²-nja (*kamitua, bahu, kebajan* dan lain²-nja).

Di MADURA penduduk berdiam tersiar dikelompokan rumah: petani; empat sampai sepuluh keluarga, kebanyakan sanak-saudara satu sama lain, bertinggal berkumpul dirumah-halamannja sendiri dengan tanah² pertanian disekitarnja. Beberapa buah *kampong* dengan tanah² pertanian disekitarnja. Beberapa buah *kampong* dibawah pimpinan seorang *apèl*, jang dibawahkan lagi oleh kelompokan lebih besar ialah *désa*, dipimpin oleh kepala-désa, jang disebut *kalèbun*. Désa sederhana itu walaupun hubungannja satu sama lain ada kendor, namun oleh penduduknja dianggap sebagai masyarakatnja.

Dimana² kepala²-désa itu mempunyai penulis² (*tjarik, djurutulis*) disampingnja. Dimana² djuga dalam dusun ada pegawai urusan agama (*modin, lebé, alim, ketib* dan sebagainya). Dimana² penduduk²-inti sekarang berapat dikumpulan²-désa untuk membitjarakan urusan² *désa* jang penting; kadang² djarang sekali (di Banten, di Madura); dilain² tempat dengan tertibnja sekali sebulan, sekali dalam tiga puluh lima hari, dan sebagainya; djarang atau kerapnja diadakan rapat ini djuga tergantung dari pendapat pegawai² pemerintah.

Dizaman dulu tertua²-désa itu adalah pendjabat² jang sangat penting (jang paling penting) dilapangan kehidupan *désa* seluruhnja. Rupa²-nja mereka dikebanjakan wilajah sudah dihapuskan.

Beberapa *désa* merdika (*perdika, pekuntjèn, midjèn, pesantrèn*) adalah *désa* jang dahulu kala dibebaskan dari beban² oleh radja, atau mendapat tugas² istimewa dari radja, masih tetap mempunyai sifat istimewa itu atas persetudjuan dari pihak gubernemen.

Djemaah² Kristen itu bukannya *désa* — walaupun memang ada beberapa *désa*-Kristen — melainkan persekutuan² daripada orang² Kristen jang termasuk dalam satu *désa*, dengan mempunyai kekajaan sendiri (*geredja, kas*) dan pengurusan sendiri.

12. Masyarakat²-hukum di ATJEH adalah semata² territorial pula.

Baik masyarakat-wilajah (jang besar) jaitu jang dikemudikan oleh *olèebalang, tjiq* atau apapun djuga sebutannja, maupun dusun²-nja disebut *gampong, meunasah*. Tidak ada istilah Pribumi buat masyarakat² wilajah itu; wilajah itu adalah *landschap*² atau bagian²-*landschap* (lebih dari seratus) atau — bila letaknja didaerah gu-*clan*² jang tersusun menurut hukum-bapa (*kawom*) dibagian² udik. Mungkin masih sedikit ada artinja, tapi mereka tidak merupakan unsur dalam

bentuk masjarakat territorial ini. Djabatkan daripada pemerintah² jang autocratis atas masjarakat²-wilajah, ialah daripada *ulëebalang*, *tjiq*, dapat diwariskan. Diputjuk pimpinan dusun² adalah pertama² kepala dusun (*keutjiq, peutua*), jang dulu diangkat oleh *ulëebalang*, tapi sedjak itu, djabatkan itu djuga dapat diwariskan. Disamping dia — disebut djuga bapa dusun — adalah *teungku* atau buat dilain tempat: *imeum*, disebut djuga ibu dusun; jang terachir ini bertugas memelihara urusan kerochianan dan ke-Islam-an, dan dua pen-djabat ini bersama suatu dewan tertua², *ureueng tuha*, mendjalankan pemerintahan didusun.

13. Selandjutnja termasuk djuga golongan masjarakat² territorial jang bulat²: dusun² di BANGKA dan BELITUNG dan dusun² di PANTAI² TIMUR KALIMANTAN dan SUMATRA (lingkungan Melaju). Selandjutnja „onderdistrik²” di GORONTALO, ialah masjarakat²-wilajah dibawahkan *marsaolëh*, dan dusun dalam BOLAANG MONGONDOW dikemudikan oleh kepala-dusun, (*kimelaha*) dibantu oleh pembantu² *probis* dan disokong oleh tertua² kerabat (*guhania*). Terhadap penduduk² kepulauan BANGGAI dichabarkan orang bahwa mereka berdiam berserak seluruh kepulauan dengan tiada sedikitpun ikatan atau hubungan satu sama lain. Kepala²-nja: *tenggol*, jang terdapat disana, rupa²-nja adalah bikinan radja² Pribumi jang berasal dari luar. Djuga dikalangan suku-bangsa NGADA dipulau FLORES, diantara Mangarai dan Nagé, terdapat kehidupan tersiar sendiri² tanpa hubungan satu sama lain. Kerabat² ketjil² berdiam disana dengan berdiri sendiri jang satu tak tergantung dari jang lain dan tanpa ikatan-masjarakat sedikitpun diatasnja.

Demikianlah oleh masjarakat² jang tersebut tadi dikuasailah kehidupan-hukum sehari² daripada berdjuta² orang² Indonesia, dan dipertahankanlah hukum-adat oleh *penghulu²-rakjat*-nja (*volkschoofden*), *pengulu jang memegang adat*. Tugas menurut hukum-adat daripada penghulu²-rakjat ialah „meletakan suatu pada tempatnja” (= „elk ding zijn plaats geven”) djadi memelihara djuga „ketertiban” (hukum), maka bagian² dari tugas itu saban² akan muntjul untuk dibitjarakan; baik dipandang dari sudut pen-djagaan ketertiban-hukum (*preventieve rechtszorg*) maupun dari sudut peradilan perselisihan², maka tugas tadi meliputi seluruh lapangan hukum. Penghasilan daripada kepala² dusun itu (terlepas dari tolong-menolong, pekerdjaan dinas untuk kepalanja, hal. 122) mentjerminkan matjam² pekerdjaannja dan seharusnya — menilik sebutan²-nja istimewa — mendapat perhatian dari fihak hukum-adat. Untuk menerima dan membelandjakan jang tepat sumba-

ngan² berdasarkan Islam, jang berupa beras/padi dan wang (*djaukat* sesudah panen dan *pitrah* sesudah puasa), maka hal² ini diurus oleh pegawai dusun urusan agama.

Bagaimanapun djuga pentingnja pembentukan hukum dalam masyarakat² ketjil² itu, namun masyarakat² itu tidak merupakan masyarakat² Indonesia seluruhnja. Disamping hukum-adat dimasyarakat² itu ada hukum-adat dari asal lain, ialah jang tidak terbentuk dimasyarakat² ketjil² itu, walaupun ada keharusannja bertalian dengan itu. Karena disamping — walaupun djuga berhubungan — lingkungan-rakjat daripada sesama anggauta² masyarakat, terdapat lingkungan-hukum daripada orang² luar masyarakat (*gemeenschapsvreemden*).

2. LINGKUNGAN — RADJA².

Walaupun satu sama lain bertalian erat, namun lingkungan-radja² dapat dipandang berhadapan dengan lingkungan-rakjat dimasyarakat²-hukum jang ketjil²; baik radja berasal (keturunan dari bangsa penghulu² diwilajah sendiri, bangsa mana bentumbuh menjadi bangsa radja², maupun dia seorang Indonesia berasal dari luar daerah situ ataupun bahkan dia seorang berasal dari luar Indonesia, namun dimana² lingkungan-radja² itu mempunyai tjorak² jang sama djenisnja. Pribadi radja itu adalah sebagai pemilik kekuasaan, titik-pusat daripada kekajaan daja-sakti dalam keradjaan itu, beserta lembaga-(keradjaan), perhiasan² keradjaannja, ialah apa jang disebut *upatjara*. Dapat dikatakan djuga, bahwa radja itu diwaktu naik tachtta mewarisi benda² keramat itu, atau bahwa benda² keramat itu (sebagai perwujudan kesatuan keradjaan) mewarisi dia. Radja dan keradjaannja adalah satu, segala²-nja dalam keradjaannja adalah miliknja, dalam theorie kekuasaannja tak terbatas, ia dihormati setjara radja Rum dulu (*Byzantijs*), ia didewa²-kan; akan tetapi, karena kesedjahteraan keradjaan adalah kesedjahteraannja (dan sebaliknya) dan dalam praktijknja kekuasaannja terbatas, maka dari itu ia tak menjinggung²-nja dan membiarkannja sadija imbalan timbal balik antara keradjaan dan dirinja itu. Sekitarnja berkerumunlah kerabat radja (bangsawan) dan pegawai²-keradjaan tinggi. Martabatnja terhadap satu sama lain dari atas sampai kebawah dibeda²kan dengan saksama, untuk perkawinan² maka soal sukses dalam kehidupan memungkinkan memasuki golongan² bangsawan tadi, kepada mereka pula jang pada awal-mulanja tak terdengkan tjermatnja. Di Djawa misalnja djangan sekali² orang timbul mempergunakan alat² jang dapat dipergunakan djuga untuk seorang

tumenggung : tetapi dikalangan mereka jang sudah modern hal sedemikian itu sudah makin hilang. Di Bali, maka kebangsawanan-kasta ($\pm 8\%$ dari penduduk) itu dapat dianggap sebagai golongan jang hidup diluar dèsa. Dimana organisasi radja² berasal dari ketumbuhannja susunan-rakjat, seperti di Sulawesi Selatan, dan dimana karena pertalian-perkawinan terdjadi perhubungan erat antara keturunan-radja² dan penghulu²-rakjat (*volkschoofden*), maka disitu perbedaan antara penghulu²-rakjat dan bangsawan-radja² adalah lebih beda dalam tingkatannja (*gradueel*) daripada dalam dasarnja (*principeel*) walaupun kedua golongan itu tetap dapat disilah²-kan sebagai „golongan” dan „golongan-disisi”, walaupun radja dan kerabatnja berada diluar, dan penghulu²-rakjat rendah dan didalam masjarakat² ketjil² itu (penghulu²-rakjat atasan kadang² ditengah²-nja).

Termasuk bangsawan dan pegawai-tinggi djuga ialah mereka jang mendjalankan pemerintahan atas penduduk, jang menjampai-kan perintah² dan jang menerima dan meneruskan pembajakan pajak² (mereka dari tingkat atasan berpangkalan di-ibukota, mereka dari tingkat bawahan di-pedalaman). Pegawai-bawahan radja dipedalaman segera sedikit banjak memperoleh sifat penghulu-rakjat (*volkschoofd*). Seluruh golongan digadji oleh radja, karena mereka diberikan hak menarik penghasilan-radja dari wilajah jang tertentu. Alam radja dan bangsawan istana dengan bahasa-istananja, dengan keseniannja bunji²-an, tari²-an dan sandiwara, dengan seni pandai, ukiran kaju dan ukiran kulitnja, dengan sasteranja jang telah dilazimkan, mereka semuanya bertinggal di ibukota, maka alam tadi mempunjai adat² sendiri dan aturan² hukum sendiri. Tentang pembagian susunan kota² keradjaan, hubungannja pembagian itu dengan „klassifikatie primitief”, jang djuga meliputi persusunan seluruh bentuk keradjaan, dan susunan kepegawaian, maka soal² ini adalah suatu kenjataan jang menarik perhatian tapi belum tjukup diselidiki seluruhnja (Gorontalo, Tawaili, Ngajogjakanta dan sebagainya). Adalah suatu organisasi dan susunan bertingkat², jang memberikan kesempatan kepada para kepala untuk tjampur tangan dalam urusan kehidupan hukum daripada pegawai² bawahannja : diwaktu kematian, diwaktu perkawinan, diperdjandjian² atas tanah, dalam urusan hutang piutang wang, dan seterusnya. Hak² atas tanah di-ibukota adalah sebagian hak²-tempat-tinggal-djabat (ambtelijke woon-rechten) atas tanah halaman, jang makin tjenderung kearah hak jasan, sebagian pula adalah hak² sementara buat orang asing (misalnja dikampong² tempat tinggalnja pedagang² dari luaran). Penduduk lambat laun memperoleh hak² bebas jang dapat diperdagangkan, atas bidang² ketjil² tanah pekarangan sebagaimana dipedalaman tanah Djawa kadang² bagian² ketjil² daripada tanah halaman rumah² kabupaten jang luas² dipindahkan tangan, sehingga djatuh ditangan lain sebagai tanah jasan. Radja adalah hakim tertinggi, ia

menjuruh mengadili liwat pengadilan²-nja, jang membina hukum-keradjaannja berwujud keputusan²-nja dan selain daripada itu mengadili djuga perselisihan² diantara hamba² radja jang tak dapat diputuskan dimasyarakat² ketjil² sehingga ia oleh karenanja ikut memelihara dan mempengaruhi hukum-adat daripada masyarakat² itu. Sebagai pedoman (instruksi), radja menjampaikan kepada pengadilan²-nja suatu *undang undang* (Ind.), suatu *nawala* (Dj.), suatu "kitab undang² hukum", jang kesemuanja berasal dari dalam negeri sendiri atau dari luarnya. Kemudian — lebih² karena pengaruh Barat — tumbuhlah kebiasaan pembikinan undang-undang berupa *pranatan* (Dj.), *peswara* (Bal.), *undang undang*, sehingga terdapatlah suatu hukum-adat tertulis, jang dalam alam rakjat rupa²-nja hanya dapat sekedar bertumbuh didusun² di Ambon dan Bali. Aturan² desa di Djawa adalah buatan² pegawai² pemerintah. Radja adalah kepala agama; ia memerintahkan diaturnja urusan² agama dan dalam sementara hal djuga diadilinja perkara, kepada pegawai tertinggi urusan agama, ialah kepala masjid kota-istana. Dibawah hakim² urusan² keduniawian dan keagamaan dari pusat ini, maka terbentuklah susunan hakim² bawahan ditempat² pemerintahan jang tak begitu penting dalam daerah keradjaan. Buat orang² luar masyarakat (penduduk kota, pegawai²) maka pemegang hukum itu lebih pentingnja daripada buat rakjat diluar tempat² situ.

Alam radja², walaupun disatu fihak berkedudukan djauh dari alam rakjat, namun berhubungan dengan itu djuga. Radja itu asal keturunan dari pahlawan-sakti dialam-gaibnja rakjat; arti kesaktian benda² pusaka keradjaan disadari oleh segenap rakjat dari tingkatan atas sampai kebawah; pesta² dan kenduri² dengan bagiannja makanan² mengeratkan persatuan antara radja dan rakjat dengan tjara mutlak dan djitu buat kedua fihak; dalam urusan perselisihan antara masyarakat² jang dapat menimbulkan perang-penghulu²-rakjat, maka pengaduan dihadapkan radja, jang keputusannja ditaatinja. Atjap kali radja dalam kedudukan sedemikian itu dimohon mendjadi wasit didaerah² pedalaman; sebaliknya sekali tempoh dengan sengadja pengadilan² radja dan kekuasaan radja untuk mengadili, didjauhkan dari lingkungan dusun, itupun untuk menolak pengaruh radja (sebagaimana dulu terdjadi oleh Tnganan si-orang ketjil dapat menerobos semua instansi² dan dengan berpa Dj.); djuga dalam rombongan² besar rakjat dapat mengadu tentang sesuatu ke-tidak-adil-an kepada radja (*massa-klacht*). Perempuan² dari golongan rakjat dipungut oleh lelaki² bangsawan sebagai isteri (atau bini muda); pertalian kekerabatan antara penghulu²-rakjat dan bangsawan-radja² memperkokoh persatuan

satu sama lain. Radja pada umumnya membiarkan masjarakat² itu melangsungkan kehidupannya (-hukum) sendiri²; titik pertemuan ngutan² radja atjap kali dapat sesuai benar dengan kewadajiban² penghulu²-nja, misalnja : tolong-menolong (hal. 122) dan bila demikian maka dipakai terus namanja, misalnja : *kasuwijang* (Sulawesi Selatan). Dalam urusan pungutan itu maka penghulu² itu adalah perantara dari pada rakjat dan radja. Penaikan beban pekerdjaan rodi adalah suatu kenjataan jang terkenal, begitu djuga sebaliknya penjegahan tuntutan² radja jang tak sesuai dengan adat dikalangan rakjat. Lebih² dimana pegawai² digadji dengan pungutan² tadi („lungguh” hal. 78) maka pungutan itu berulang² mengatjaukan atau membinasakan masjarakat²-hukum (para pemborong mendesak kedudukan penghulu²). Dalam lebih dari satu wilajah (Sulawesi Selatan, Sumbawa, Djawa) dulu terdapat suatu organisasi luas dari pada tukang² keradjanan tangan hamba radja jang satu sama lain dipersatukan dengan pertalian turun temurun (ikatan pertukangan hamba² radja).

Timbulnja alam radja² ini berarti djuga timbulnja golongan pertama dari pada orang² Indonesia jang hidup diluar masjarakat²; apa jang dulu banjak terdapat, pada sekarang sudah banjak jang tidak ada lagi, dan banjak setengahnja berlangsung terus tapi dalam suatu bentuk jang berlainan : radja² dan prijaji di Djawa; radja² dan keturunan radja² di Atjeh, bangsawan² Atjeh di Padang, bangsawan² Djawa dan bangsawan² pribumi di Palembang dan Djambi, didaerah Melaju dan Sumatra, di Kalimantan, Sulawesi, Ternate, Tidore, kepulauan Timor, Bima dan Sumbawa, Bali dan Lombok.

3. PEDAGANG².

Tepat disebut orang² asing dalam masjarakat (*gemeenschapsvreemden*), djuga asing diluar alam radja², ialah orang² dagang. Mereka dikota² keradjaan mengadakan kampung² sendiri, hal mana penting sekali buat perekonomian keradjaan. Untuk menghadapi alam rakjat, maka mereka berlindung dibawah kekuasaan radja atau pembesar² rendahan, sebagaimana di Toradja Barat, seorang musafir asing mendapat djaminan bantuan pembesar daerah situ dengan djalan memberikan persembahan kepadanya. Kadang² mereka mempersatukan diri dialam rakjat ditempat²-kediamannja bersama, misalnja di-pasar jang berdiri sendiri di Sumatra Selatan, di Tapanuli Selatan; di Simeuluë orang² asing itu merupakan *suku* sendiri, ialah *suku dagang*. Mereka berdiam selaku perseorangan² asing (terhadap masjarakat), tjampur dengan orang² dari suku² bangsa

lain ditempat² kediaman pemerintahan dan ditempat² pelabuhan. Hukum tak tertulis jang berlaku atas perhubungannja dengan penduduk masjarakat² Pribumi adalah tergantung bulat² disatu pihak dari hukum-adatnja persekutuan ketjil itu, tapi djuga dilain pihak sangat dipengaruhi oleh kebutuhan² jang mengandung hukum daripada hakim²-djabatan, (kadang²) djuga dari hakim² agama dan daripada pemeliharaan hukum oleh advocaat² dan notaris² — itu pun sepanjang pendjabat² tadi sadar akan sudut konstruktief daripada tugasnja. Terhadap ketertiban hukum daripada gubernemen (atau daripada radja), maka mereka tidak diketjualikan dari perlindungan, pembelaan dan pelanggaran jang berlaku atas ketertiban hukum didusun². Persoalan² hukum seperti soal timbulnja bunga menurut hukum (wettelijke Interessen), hal² dimana harus dianggap ada tergugurnja hak (rechtsverwerking), perlindungan kepentingan pemberi² hutang bilamana si-pemindjam tak mampu sama sekali untuk membayar dan banjak soal² lainnja lagi, maka kesemuanja itu ada patokannja sendiri buat perhubungan² hukum dikalangan mereka.

4. MELANTASNJA SUSUNAN PEMERINTAHAN RADJA² DAN GUBERNEMEN KEDALAM MASJARAKAT².

Antara kehidupan-hukum masjarakat²-hukum Pribumi dan ketertiban-hukum daripada radja² dan daripada gubernemen sebagaimana dapat dimengerti selalu terdapat ketegangan jang tertentu. Masjarakat² itu, bilamana tak tertjekek mati tetap berdiri sendiri sebagai lingkungan²-hukum, keluar dari ketertiban-hukum jang menjelubunginja. Jang menyebabkan ketegangan ialah karena kedua-nja bersangkutan dengan object jang sama.

Pengaruh jang merusak dari pusat keradjaan² terutama menimpa masjarakat jang terletak sekitar kediaman radja², itupun karena pemerintahan radja² sendiri jang intensief, karena penghulu² rakjat diganti dengan pegawai radja, karena pemindahan tangan daripada tanah untuk dimiliki sendiri, pemberian „lungguh” (apanges) ketjil² kepada orang² lain (jaitu pegawai² atau sanak²-saudara diberi hak memungut hasil daripada beberapa kerabat atau pen), jang batas²-nja diabaikan, untuk diri sendiri, pungutan mana-mestinja kepunjaan dan diperuntukkan radja jang memberikannja (tanaman Atjeh, Palembang, Djambi, kesultanan² Sumatra Timur, me-resap kedalam keradjaan² jang kuat di Sulawesi Selatan (Bone, di Jawa di *nagaragung*. Tidak selalu masjarakat itu mendjadi ru-

sak seluruhnja karenanja ; dèsa di Bali tetap suatu masjarakat-hukum walaupun letaknja didaerah-„lungguh“, namun dusun² disitu toch berbeda dengan dèsa dilain² tempat, antara lain karena „radja melantas kedalam dèsa“. Kemudian — karena pengaruh Belanda — maka diwilajah² situ kadang² masjarakat² itu dipulihkan lagi, hal mana sebagai misal jang djelas ialah penjusunan-kembali (reorganisatie) didaerah² swapradja di Djawa.

Kedua : kekuasaan pemerintahan radja dari luaran terhadap masjarakat² berpengaruh **m e m p e r k o k o h**, jaitu terhadap masjarakat² jang djauh² letaknja, jang oleh karena dianggapnja sebagai kesatuan² wilajah pungutan padjak dan pekerdjaan rodi, maka dari itu dengan sendirinja bentuknja kedalam mestinja didjadikan lebih kokoh, misalnja : Banten terhadap *marga* dan *bandaria* Lampong — Palembang terhadap *sikep marga* — Ternate (barangkali) terhadap *negorij*² di Ambon, terhadap clan didaerah clannja sendiri di kepulauan Sula — Karangasem dan keradjaan² lain²-nja di Bali terhadap dèsa diluar daerah-lungguh — Djawa terhadap dèsa didaerah *mantjanegara*. Kekuasaan penghulu² masjarakat bertambah ; kepentingan² masjarakat mendesak sehingga buat anggauta² masjarakat lapangannja hidup pribadi hanja tinggal sedikit ; kepentingan masjarakat **h a r u s** didahulukan, lebih² mengenai soal tanah. Ditambah pula kedudukan radja² sebagai hakim dalam perselisihan² masjarakat² itu satu lawan lain, pula berhubungan dengan itu kebanyakan lantas diberikan *piagem* sebagai surat pengesahan, maka kesemuanja itu adalah daja jang memperkokoh masjarakat² itu dalam bentuknja kedalam. Namun didalam masjarakat² itu maka selainnja kepentingan masjarakat sendiri adalah kepentingan lain jang tak dapat diabaikan. Kepentingan dan kehendak radja mendjadi faktor² jang dapat dibandel oleh masjarakat itu, tapi setidaknya²-nja toch merupakan faktor² jang harus diperhitungkan djuga.

Djuga gubernemen Belanda sampai pada tingkatan tertentu dan sedjalan dengan pemerintahan radja² mempengaruhi bentuknja susunan rakjat. Dibeberapa tempat — dikota² besar — pengaruhnja **m e r u s a k** ; di Djakarta, Surabaja dan dikota serupa itu — tapi dalam batas sempit — masjarakat-hukum Pribumi tak tampak sama sekali. Hanja sekali — jaitu di Lampong — masjarakat disitu tak diakui, lalu dihapuskan, tapi buat siapa jang menindjauja lebih dalam masih ternjata tegas berlangsungnja terus masjarakat itu tapi berada dalam kekattjauan — maka masjarakat itu sedjak tahun 1928 dipulihkan kembali menurut hukum-adat.

Disamping itu pengaruh gubernemen djuga bersifat **m e m p e r**

k o k o h , dimana gubernemen itu seperti radja², menetapkan ma-
sjarakat² itu sebagai kesatuan² untuk pungutannya pajak dan pe-
kerdjaan rodi ; kadang² sama halnja dengan radja² tjotjok dengan
pungutan pekerdjaan untuk penghulu²-nja, ialah adat tolong-meno-
long ; tjontohnja jang tertua ialah barangkali tuntutan Compagnie
megenai pekerdjaan dinas buat perdjalan²-hongi atas dasar pe-
kerdjaan dinas untuk penghulu²-nja jaitu apa jang disebut peker-
djaan-*kwarto*. Pengaruh gubernemen dulu kadang² djuga bersifat
m e m b a n g u n dimana diwilajah² jang tak teratur timbul dusun²
jang bertumbuh dan seterusnya hidup langsung dalam suasana Pri-
bumi, ialah suatu proses jang atjap kali terdjadi. Jang penting sekali
ialah dipertahankannya hak² dalam masjarakat² itu terhadap penja-
lahgunaan kekuasaan oleh penghulu²-rakjat. Tjara² untuk membela
diri jang dulu ada pada rakjat (pindah kelain tempat, mengamuk)
makin sukar buat didjalankan. Maka dari itu tambah perlu, bahwa
hakim (orang pemerintah) jang berada diatas masjarakat² melin-
dungi hak² anggauta² masjarakat itu terhadap tindakan sewenang²
dari penghulu² ; tapi djustru dalam hal ini maka tindakan melin-
dungi jang sangat (kesangatan) meluas dapat menjendi benar².

Tudjuan pemerintahan gubernemen ialah pemeliharaan kesedjah-
teraan positif, menjebabkan pelantjaran kedalam dusun², hal mana
lebih hebatnja daripada pemerintahan radja² Pribumi, dan oleh ka-
renanja mengakibatkan perobahan² dalam kehidupan masjarakat.
Dalam pada itu adalah terlalu sukar membeda²-kan antara semu
dan sungguh, karena dengan ditjatnja baru jang sesuai dengan
undang-undang haminte Bumiputera (Inlandse gemeenteordonnan-
ties) lama itu, kehidupan hukum jang sebenarnya dalam masjarakat²
dengan pengadilannya dusun, dengan pengurusannya tanah, dengan
tolong-menolongnja satu sama lain, berlangsung terus atau dapat
berlangsung terus dengan tiada atau hampir tiada gangguannya.
Undang² Haminte Bumitputera untuk luar Djawa tahun 1938
(staatsblad no. 490) dengan terang²-an memberi kesempatan untuk
itu. Bahkan gabungan² dan pemetjahan² persekutuan² jang atjap
kali mengerikan dalam tjara² melaksanakannya, bahkan pengang-
katan penghulu² oleh fihak gubernemen dan bikin² pangrehpra-
muanja itu kebanyakan adalah sebagai „aturan-désa” (dorpsregeling), kese-
dalam, walaupun tak dapat diungkiri pengaruhnja tindakan² tadi.
djadiannya perpaduan dimasing² wilajah antara bentuk menurut
kelengkapannya disatu fihak dan daja-hidup masjarakat dengan pe-
ngaruh² dari luar jang sudah meresapnja dan sedang meresapnja
dilain fihak, maka perpaduan itu mudah²-an lebih banjak daripada

sekarang, dilukiskan orang dalam risalah² (monografieën) masjara-
kat²-hukum *). Dalam pada itu hendaknja disendiri²-kan lukisan
tentang lembaga² dan hubungan² sosial dan tjara² berdjalanja itu
disatu fihak dan pentjataan adanja bentuk² hukum.
san² dan aturan² dilain fihak, bentuk² hukum mana pula dapat
mendjadi bahan² buat penjelidikan kearah nilai²-nja functioneel.
Mengenai kedua persoalan itu : ialah lukisan kenjataan² sosial me-
adanja hukum jang berlaku, maka masing² dari keduanja itu dja-
nganlah diabaikan hendaknja ; buat hakim maka kedua²-nja
adalah penting (hal. 236).

*) Seperti buah tangan Friedericy : „Ponré”, dan „Tnganan Pagringsingan”
oleh Korn.